

**KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON
DALAM MENANGANI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

ARTA FLORIDA

6661072639

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ARTA FLORIDA
NIM : 6661072639
**Judul Skripsi : KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL KOTA CILEGON**

Serang, Februari 2013

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si

Nip. 197108242005011002

Anis Fuad, S.Sos.,M.Si

Nip. 198009082006041002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si

Nip. 197108242005011002

ABSTRAK

Arta Florida. NIM. 6661072639. 2013. Skripsi. Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing 1 DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si dan Pembimbing 2 Anis Fuad, S.Sos.,M.Si.

Kata Kunci: Kinerja Dinas Sosial, Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu masalah sosial yang perlu segera ditangani. Banyaknya perindustrian yang berdiri di Kota Cilegon merupakan salah satu penyebab PSK berdatangan dari berbagai daerah. Dinas Sosial Kota Cilegon sangat berperan dalam menangani Pekerja Seks Komersial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Sosial dalam Menangani Pekerja Seks Komersial. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi Hersey, Blanchard, dan Johnson, yaitu : Tujuan, Standar, Alat/Sarana, Kompetensi, Motif, Peluang dan Umpan Balik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi dan memberchek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam menangani Pekerja Seks Komersial belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya PSK yang belum mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial, sasaran pembinaan yang tidak tepat serta anggaran yang minim yang mengakibatkan pembinaan hanya dilakukan dalam setahun sekali oleh Dinas Sosial. Saran peneliti adalah pembinaan yang diberikan kepada PSK dapat dilakukan secara berkelanjutan sampai PSK tersebut mahir. Sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang usaha bagi PSK.

ABSTRACT

Arta Florida. NIM. 661072639. 2013. Performance of Social Service Cilegon to Handling Commercial Sex Workers. Public Administration Departement, Faculty of Social and Political science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. The First Advisor is DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si and The Second Advisor is Anis Fuad, S.Sos.,M.Si.

Keywords: Performance of Social Service, Commercial Sex Workers (PSK).

Commercial sex workers is one of the social problems that need to be addressed. Many industry standing Cilegon City is one of the causes of prostitutes coming from different regions. Cilegon City Social Servis play an important role in dealing with Commercial sex workers. Purpose of this study is to investigate and analyze the performance of Social Services for Handling Social Cilegon Commercial Sex Workers (PSK). Methods The study used in a qualitative approach. This study uses the theory of organizational performance Hersey, Blanchard, and Johnson, that means : Goals, Standards, Equipment / Facilities, Competence, Motive, Opportunity and Feedback. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation study. The techniques used in analyzing the data is a technique by Miles and Huberman analysis. As for the validity of the test is to use a triangulation of sources. The results showed that the performance of the Department of Social Welfare Cilegon in handling commercial sex workers can't be maximized, Because there are many Commercial Sex Workers who have not received assistance from Sosial Servis. Resulting in minimal budget guidance only done once a year by the Department of Social Welfare. Researchers are coaching advice given to prostitutes to do on an going basis until the PSK proficient. So that it can provide business opportunities for PSK.

*Bila Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar.
Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar.
karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa,
maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan
untuk menjadi bisa. (Henry Ford)*

Hidup itu sudah susah, jangan dibuat
susah .
Jalani saja dengan apa adanya, semangat
dan tetap tersenyum....^_^

Skripsi ini aku persembahkan untuk
Mamah dan Bapak ku tercinta
Abang dan Adik – adikku tersayang
Kalian segalanya buat ku
Miss u.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arta Florida
NIM : 6661072639
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 23 Agustus 1989
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial adalah asli karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 11 Februari 2013

ARTA FLORIDA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ARTA FLORIDA
NIM : 6661072639
Judul Skripsi : KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON DALAM
MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 11 bulan
Februari tahun 2013 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 11 Februari 2013

Ketua Penguji :

Yeni Widyastuti, M.Si

NIP. 19760210 2005012003

Anggota :

Riny Handayani, S.Si., M.Si

NIP. 197601062006042007

Anggota :

Anis Fuad, S.Sos., M.Si

NIP. 198009082006041002

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

DR. Agus Siafuri M.Si

NIP. 19710824 2005011 002

Ketua Program Studi

Rina Yulianti, S.IP., M.Si

NIP.197407052006042011

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpah Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Meskipun dalam penyusunannya banyak mengalami kendala – kendala dan kesulitan yang dikarenakan oleh keterbatasan penulis dalam kemampuan dan keterbatasan penulis dalam membuat skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Skripsi dengan judul “ **Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial** “.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik seluruh alam beserta isinya.
2. Kedua Orang Tua, sebagai motivator yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
3. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. DR. Agus Syafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan dosen pembimbing I.
5. Kandung Sapto Nugroho. S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Gandung Ismanto, S.Sos, M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Rina Yulianti, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
8. Anis Fuad, S.Sos selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara, serta penganti dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abdul Hamid, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
10. Listyaningsih, M.Si selaku Pembimbing Akademik Prodi Administrasi Negara, yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya Dosen prodi Administrasi Negara yang telah membekali peneliti dengan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
12. Seluruh Staff Prodi Administrasi Negara yang telah membantu dalam memberikan informasi.
13. M. Sudaryo, SE, M.Si selaku Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang telah menyediakan waktu bagi peneliti untuk melakukan wawancara dan memberikan data kepada peneliti.
14. Asep Saifulloh, S.Ag., M.Si selaku Kasie Rehabilitasi Sosial,
15. Eha Nursoleha, SE selaku Staff Rehabilitasi Sosial,
16. Kakak tercinta Stephanus Rayando, Amd serta Adik – Adik ku Paul Robertho dan Simon Prima
17. Teman seperjuangan Arline Maisella Dewi, S.Sos dan Dina Karina Karin, S.Sos yang selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis dalam hal pembuatan skripsi ini dan yang selalu memberikan masukan.

18. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya kelas A yang juga telah banyak memberikan ide-ide dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

19. Teman Spesial penulis Slamet Nofrianto yang selalu menemani dan tidak pernah berhenti untuk memberikan support dan motivasi kepada penulis.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini dapat menambah wawasan pembaca dalam hal penyakit sosial seperti Pekerja Seks Komersial yang telah tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Kota Cilegon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi di masa yang akan datang.

Penulis menyadari akan kekurangan yang terdapat pada penyusunan skripsi ini baik dari segi isi maupun struktur penulisan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis, sehingga kedepan bisa lebih baik.

Serang, Februari 2013

Arta Florida

DAFTAR ISI

JUDUL

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 12

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 12

1.4 Tujuan Penelitian 13

1.5 Manfaat Penelitian 13

1.6 Sistematika Penelitian 15

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori	19
2.1.1 Pengertian Kinerja	19
2.1.1.1 Kinerja Organisasi	20
2.1.1.2 Faktor – faktor Kinerja.....	22
2.1.1.3 Indikator Kinerja	24
2.1.1.4 Pelaksanaan Kinerja	26
2.1.1.5 Pengukuran Kinerja	27
2.1.2 Penyakit Sosial	29
2.1.3 Kebijakan Sosial	30
2.1.4 Pekerja Seks Komersial	33
2.2 Kerangka Berpikir	36

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	39
3.2 Instrumen Penelitian	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4 Informan Penelitian.....	43

3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	45
3.6 Pengujian Keabsahan Data	48
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial	52
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	56
4.1.3 Gambaran Umum Lokasi dan Praktek Prostitusi	60
4.2 Deskripsi Informan Peneliti	64
4.3 Deskripsi Data Peneliti	66
4.3.1 Tujuan Dinas Sosial	67
4.3.2 Standar Dinas Sosial	76
4.3.3 Alat / Sarana	83
4.3.4 Kompetensi Dinas Sosial	89
4.3.5 Motif Dinas Sosial dan PSK	90
4.3.6 Peluang Dinas Sosial dan PSK	93

4.3.7 Umpan Balik Masyarakat, PSK dan Mantan PSK	95
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	100

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 SKEMA KERANGKA BERPIKIR	38
GAMBAR 3.1 ANALISIS DATA MILES & HUBERMAN	46
GAMBAR 4.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON	52
GAMBAR 4.2 PELATIHAN DAN KETERAMPILAN DINAS SOSIAL	68
GAMBAR 4.3 TAHAP PROGRAM PELAKSANAAN	77
GAMBAR 4.4 PEMERIKSAAN DINAS SOSIAL	81
GAMBAR 4.5 PENANGKAPAN PSK OLEH SATPOL PP	84
GAMBAR 4.6 PELATIHAN SALON	89
GAMBAR 4.7 DIAGRAM PEMBINAAN PSK	114

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 KATEGORI DAN SPESIFIKASI INFORMAN	44
TABEL 3.2 JADWAL PENELITIAN	51
TABEL 4.1 PEGAWAI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON	55
TABEL 4.2 KARAKTERISTIK PSK	62
TABEL 4.3 TEMUAN HASIL PENELITIAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sekarang ini keberadaan Wanita Tuna Susila atau sering disebut Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Cilegon, akan tetapi keberadaan PSK tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Cilegon. Perubahan masyarakat dari agraris menuju masyarakat industri dapat mengakibatkan perubahan, baik dari pola hidup, nilai-nilai, norma sosial bahkan juga pada struktur masyarakat. Dengan perubahan - perubahan sosial yang terjadi di Kota Cilegon menyebabkan banyaknya masalah sosial yang timbul di kehidupan masyarakat Kota Cilegon. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah sosial dan lain sebagainya.

Selain itu dampak dari masalah sosial adalah krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang jatuh miskin, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari kerja dan mendapatkan makanan. Kemiskinan yang melahirkan hilangnya kepercayaan diri yang mengakibatkan perempuan mudah terbawa arus

kepentingan materialism. Kemudian, banyak jalan pintas yang ditempuh perempuan untuk menutupi kekurangan rasa percaya diri akan kemampuannya dengan lari pada pekerjaan – pekerjaan instan yang penuh nuansa glamour. Misalnya, kehidupan para perempuan cantik di dunia gemerlap (dugem) yang menjadi simbol perempuan gaul, yang mengikuti trend zaman modern dengan bisnis hiburan yang terselubung, yakni prostitusi. perempuan yang kehilangan harga diri, akan mudah terpengaruh oleh rayuan bisnis kejahatan, yang menjual jasa pada bisnis seksual untuk mendapatkan keuntungan besar. Dampak buruk dari kemiskinan tersebut juga menghasilkan permasalahan yang berhubungan dengan wanita, yang terpaksa melakukan prostitusi demi membiayai hidup diri sendiri dan keluarganya.

Banyaknya perindustrian di Kota Cilegon merupakan salah satu faktor yang menimbulkan banyaknya PSK di Kota Cilegon. Kota yang semakin tumbuh berkembang dengan pesat ini merupakan kota yang memiliki perusahaan baja terbesar yang menghasilkan perekonomian yang baik bagi masyarakatnya, kota industri ini banyak mendatangkan orang – orang asing yang menanam sahamnya di beberapa perusahaan di Kota Cilegon dan mendirikan perusahaan di kota ini. Sehingga perubahan pola hidup masyarakat Kota Cilegon tidak jauh mengikuti pola hidup dari masyarakat Barat.

Kota Cilegon yang merupakan kota transit dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa yang banyak sekali mendatangkan masyarakat – masyarakat dari luar Pulau Jawa, seperti dari Lampung, Palembang, Padang, Medan dan lain sebagainya. Mereka yang datang dari berbagai daerah ini mencoba untuk

mengais sedikit rezeki di Kota Cilegon dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. dari sekian banyak orang perantau yang datang ke Kota Cilegon tidak memiliki nasib yang baik. Kebanyakan dari mereka yang merantau ke Kota Cilegon dikarenakan perekonomian yang rendah atau dari keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki ijazah sekolah.

Hal ini merupakan kenyataan yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk mencari nafkah, baik dari wanita yang berusia belia sampai wanita yang berusia tua. Peristiwa tersebut dapat kita lihat di sepanjang jalan Kota Cilegon, dimana wanita – wanita itu berdiri di pinggir jalan sambil mengeksploitasikan dirinya dengan pakaian yang minim, selain itu juga kita dapat melihat kejadian yang berada di tempat hiburan, dimana para wanita yang mencari nafkah itu bekerja sebagai wanita penghibur didalamnya. Hal ini merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Kota Cilegon. Dimana, banyak wanita – wanita yang mencari nafkah dengan jalan seperti itu untuk membantu perekonomian keluarganya dan untuk membiayai kelangsungan hidupnya.

Di Negara - negara lain istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial. Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (*stigma*) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang

mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.¹

Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas, Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan Pekerja Seks Komersial adalah suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan si perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa negara.

Kehidupan Wanita Tuna Susila atau sering disebut juga PSK, sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit. Bahaya yang mengancam perempuan yang suka berganti – ganti pasangan seksual yakni akan mendapatkan Penyakit Menular Seksual (PMS). Penyakit menular ini sebagian besar diakibatkan oleh kontak kulit ketika berhubungan seksual. Penyakit menular seksual tersebut seperti penyakit jengger ayam, epidemic HIV / AIDS, yang mengakibatkan rasa sakit yang parah, bahkan mengarah pada kematian. Perempuan paling rentan tertular penyakit menular seksual jika melakukan hubungan seksual dengan berganti – ganti pasangan. Cara penularan penyakit menular seksual bias terjadi ketika pertama kali berhubungan dengan orang yang terjangkit virus HIV atau ketika melakukan hubungan berkali – kali baru terjangkit. Namun, indikasi yang paling terlihat

¹ <http://www.pikiran rakyat.com>

adalah bagi perempuan yang bekerja dalam bisnis seks akan berpeluang lebih besar untuk terjangkit dan menularkan penyakit seksual.

Masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena hal ini dapat mengakibatkan efek yang buruk bagi wanita dan masyarakat Kota Cilegon. PSK yang berkeliaran di jalan dapat mengganggu pemandangan yang tidak enak dilihat. Dengan pakaian yang seksi mereka merayu para kaum adam untuk mendapatkan sedikit uang dari para kaum adam. Selain itu juga, masyarakat sering terganggu dengan keberadaan PSK tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dimana masyarakat takut akan suaminya tergoda dengan keberadaan PSK tersebut. Belum lagi PSK yang suka membawa pasangannya ke tempat tinggalnya. Untuk menangani Pekerja Seks Komersial yang berada di Kota Cilegon, pemerintah melalui Dinas Sosial memberikan modal untuk melakukan pembinaan terhadap PSK tersebut.

Kota Cilegon terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Grogol, Purwakarta, Jombang dan Citangkil. Secara Geografis Kota Cilegon mempunyai luas wilayah 175,5 km². Kota Cilegon memiliki fisik wilayah yang cukup bervariasi baik ditinjau dari ketinggian maupun lereng. Jumlah penduduk terbanyak Kota Cilegon terdapat di Kecamatan Jombang dengan jumlah 49.800 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Grogol dengan jumlah 28.925 jiwa. Saat ini status Kota Cilegon sebagai kota industri (Non migas) dan perdagangan. Sebagian besar penduduk Kota Cilegon berpendidikan akhir STM atau SMU. Keberadaan industri menjadi sumber utama kehidupan

masyarakat Cilegon. Dari sekitar 101.000 penduduk masyarakat yang produktif, sekitar 29% diantaranya bekerja di bidang industri dan jumlah penduduk yang menganggur mencapai 41.841 orang. Meskipun saat ini ada ribuan industri di Kota Cilegon, sekitar 109 diantaranya Industri besar, dari sekitar 300.000 masyarakat Cilegon, 60.000 diantaranya berada di garis kemiskinan. Selain itu juga Kota Cilegon merupakan perbatasan antara pulau Sumatera dan Jawa, dimana sebagian penduduk Kota Cilegon berasal dari Pulau Sumatera.²

Berdasarkan data rekapitulasi yang didapat dari Dinas Sosial Tahun 2010, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cilegon mencapai 18.976 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 22 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yakni anak balita telantar, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga fakir miskin, rumah tidak layak huni, keluarga rentan, orang gila, anak nakal, anak jalanan, tuna susila, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban penyalahgunaan Napza, orang dengan HIV / AIDS, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis.

Jumlah Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon mencapai 150 orang pada tahun 2009, akan tetapi jumlah tersebut semakin bertambah pada tahun 2010 hingga mencapai 209 orang. Namun ditemui kejanggalan pada

²*Badan Pusat Statistika Kota Cilegon : 2010*

data yang didapat tahun 2012 yang hanya mencapai 15 orang Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon, yang mana dari data tersebut terlihat bahwa daerah Merak tidak terdapat sama sekali PSK. Padahal dari observasi di lapangan daerah Merak merupakan daerah yang sangat banyak terdapat PSK didalamnya. Hal ini membuat peneliti merasa janggal terhadap data tersebut yang tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Dimana dari hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa PSK di Kota Cilegon sampai pada tahun 2012 mencapai \pm 300 orang, berikut pernyataan dari beberapa informan :

Bahwa terdapat \pm 50 orang PSK yang menjajakan dirinya di sepanjang daerah rel kereta api kawasan PT. Statomet, mulai dari kalangan ibu – ibu sampai dengan kalangan anak muda. Belum lagi PSK yang menjajakan dirinya di sepanjang jalan daerah Hotel Merpati terdapat 4 sampai 6 orang.³

Banyaknya tempat – tempat hiburan juga memacu untuk hadirnya PSK di tempat hiburan tersebut. Letak Kota Cilegon yang sangat strategis tentu saja akan membuat tempat – tempat hiburan terus berkembang seiring dengan kebutuhan yang ada. Sehingga sektor ini mempunyai prospek yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan optimal. Sebelum Kota Cilegon mengalami perkembangan yang pesat, Kota Cilegon hanya memiliki beberapa tempat – tempat hiburan, seperti: Dinasty, LM Modern, Krakatau Saiki, Amigos, Regent dan Planet. Tetapi dengan perkembangan

³ Wawancara Romi, pemilik warung, pada tanggal 20 November 2012, pada pukul 23.30, di daerah Merak.

Kota Cilegon yang semakin pesat, semakin banyak tempat – tempat hiburan yang dibangun dan dibuka di berbagai daerah di Kota Cilegon, seperti Inul Vista, Shitzuke, Cafe Parahiangan, Blue Star, Kenko, Hanna, dan Warung remang – remang yang banyak sekali dibuka di pinggiran jalan. Tempat hiburan seperti inilah merupakan salah satu tempat penyalur PSK yang di koordinir oleh para Mami / Germo dan tempat hiburan bagi para kaum adam yang ingin menikmati sebotol minuman keras dengan ditemani oleh salah seorang wanita pekerja seks komersil serta tempat untuk membuang rasa penat dari berbagai kalangan dengan menikmati alunan musik yang keras.

Dari sekian banyak tempat hiburan yang ada, di salah satu tempat hiburan di Kota Cilegon disebutkan bahwa setiap Mami memiliki 40 orang anak PSK yang ada dalam kendali para mami di tempat hiburan tersebut. Sedangkan di setiap tempat hiburan minimal mempunyai Mami / Germo 2 orang ($2 \times 40 = 80$ orang).⁴ Sedangkan Kota Cilegon memiliki 6 tempat hiburan yang besar (6×80 orang = 240 orang). Lain hal dengan yang di miliki para mami di tempat hiburan yang hanya sebatas warung remang – remang, minimal mami memiliki 5 orang PSK yang dibawah kendali mami tersebut.

Tidak hanya di Daerah Merak saja yang memiliki PSK, melainkan daerah Simpang / Sumampir dan di daerah Cilegon merupakan tempat PSK yang bernaung untuk mendapatkan pelanggan terdapat beberapa PSK yang

⁴ Wawancara Mami R, yang bekerja di salah satu tempat hiburan di Kota Cilegon, 26 September 2012, pukul : 12.00

menjajakan tubuhnya di warung – warung sepanjang jalan Simpang, 6 orang yang mangkal di depan Hotel Kalimaya.⁵

Dari informan di atas menunjukkan bahwa semakin bertambah banyaknya PSK di Kota Cilegon pada tahun 2012. Tetapi dalam data yang didapat dari Dinas Sosial tidak sesuai dengan yang ditemukan oleh peneliti. Hal seperti itu lah yang menjadi permasalahan yang penting dan perlu segera ditangani terutama oleh Dinas yang bersangkutan, yaitu Dinas Sosial Kota Cilegon, agar jumlah tersebut tidak semakin bertambah banyak pada tiap tahunnya. Dengan merebaknya PSK di Kota Cilegon tentu saja akan memberikan dampak negatif yang sangat besar kepada masyarakat. Kenyamanan masyarakat Kota Cilegon pada khususnya akan sangat terganggu dengan kehadiran PSK.

Dalam hal ini tugas pokok Dinas Sosial sesuai dengan PERDA No. 38 Tahun 2008 pasal 13 ayat 1, salah satunya adalah Penyelenggaraan Program, Kegiatan, dan Pengendalian Anggaran pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sudah dilakukan dengan memberikan kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap PSK, seperti pembinaan Salon dan Tataboga. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dalam menangani PSK Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Satpol PP itu sendiri untuk menangani PSK mempunyai Tupoksi hanya sebagai penertiban untuk merazia PSK yang berpegang pada PERDA No. 5 tahun 2001. Sedangkan

⁵ Wawancara Mbak Santi, di kontrakan, 20 November 2012, pukul 22.00.

Tupoksi Dinas Kesehatan dalam menangani PSK adalah Melaksanakan Pembinaan, Evaluasi dan Analisa Hasil, Supervisi Monitoring Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Kepada Masyarakat dan Sarana Kesehatan. Satpol PP sudah melakukan Tupoksinya dengan baik dalam Menertibkan dan Merazia PSK, Dinas Kesehatan juga sudah menjalankan Tupoksinya dengan baik untuk mengecek darah PSK. namun dalam Pengkoordinasian data PSK dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan masih belum di jalankan dengan baik, dimana dari hasil razia PSK Satpol PP hanya menyerahkan PSK kepada Dinas Sosial tanpa mendata terlebih dahulu PSK yang ditangkap, kemudian Dinas Kesehatan hanya mencatat data PSK yang terjangkit penyakit HIV/AIDS itupun dicatat dengan kode, karena Dinas Kesehatan hanya diundang oleh Dinas Sosial, sedangkan Dinas Sosial selalu berpikir Satpol PP telah mendata PSK yang tertangkap. Sehingga dalam pencarian data PSK masih belum dapat dilakukan dengan baik, alhasil, untuk melihat grafik pertumbuhan PSK di Kota Cilegon tidak dapat dilakukan dengan baik dikarenakan data PSK yang tertangkap tidak dicatat dengan sebagaimana mestinya. Dinas Sosial hanya mendata PSK yang ikut pembinaan saja, sedangkan PSK yang tertangkap Dinas Sosial tidak mempunyai datanya. Hal ini terjadi karena sifat malas Dinas Sosial dalam pencatatan data PSK yang tertangkap, dimana dalam PERDA No. 38 tahun 2008 pasal 17 tercantum bahwa Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Penganalisaan Data pada Seksi Rehabilitasi Sosial.

Selain itu, permasalahan yang terjadi di Kota Cilegon dalam menangani Pekerja Seks Komersial adalah ketidakterseediaannya tempat Rehabilitasi bagi PSK. Selama ini, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon sangat terbatas, dikarenakan belum adanya tempat Rehabilitasi di Kota Cilegon, sehingga PSK yang tertangkap ada yang dilepaskan begitu saja dan ada yang dikirimkan ke tempat Rehabilitasi di Pasar Rebo Jakarta atau tempat Rehabilitasi di Pasar Ona Rangkasbitung untuk dibina. Hal ini membuat Dinas Sosial tidak dapat memantau atau membina secara langsung PSK. Karena hanya di Jakarta dan di Rangkas yang memiliki tempat Rehabilitasi.

Program – program Dinas Sosial Kota Cilegon dalam penanganan PSK pun masih belum terkoordinir dan terintegrasi dengan jelas. Dalam melaksanakan program – program pembinaan dan pelatihan terhadap PSK, seperti Salon dan Tata boga, Kepala Bidang Dinas Sosial mengungkapkan bahwa pada tahun 2011, Dinas Sosial memberikan pelatihan berupa Salon terhadap PSK yang di daerah merak. Sedangkan pada tahun 2012 hanya memberikan pelatihan berupa Tataboga saja. Dalam pelatihan Salon dan Tata boga hanya dilakukan sekali dalam setahun, sehingga pelatihan yang di berikan hanya sekedar pelatihan begitu saja, tanpa ada keberlanjutan untuk mengasahnya lagi. Hal ini dapat membuat PSK kembali pada profesinya lagi.

Oleh karena itu permasalahan yang dipaparkan di atas, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi masalah PSK di Kota Cilegon. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota

Cilegon yang menangani masalah-masalah sosial yang muncul, termasuk masalah Pekerja Seks Komersial ini. Untuk itulah hal tersebut sangat menarik bagi peneliti, sehingga peneliti mengambil judul penelitian tentang **“KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIL.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat pula masalah – masalah yang teridentifikasi, sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Cilegon dari tahun 2009 hingga tahun 2012.
2. Adanya kesenjangan data Dinas Sosial tahun 2012 dengan data yang ada di lapangan.
3. Ketidakjelasan dalam pencatatan data PSK yang tertangkap Satpol PP.
4. Belum adanya tempat rehabilitasi bagi PSK di Kota Cilegon.
5. Terbatasnya Program – program yang diberikan Dinas Sosial terhadap PSK.

1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Suatu masalah yang akan dibahas atau dianalisis apabila tidak diberikan batasan ruang lingkup pembahasan tentu akan menjadi panjang lebar dan tidak terarah, yang akhirnya akan mempengaruhi ketidakstabilan sasaran yang diinginkan.

Dalam hal ini peneliti hanya membatasi penelitian fokus penelitiannya pada Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga penulis harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu memperjelas pengkajiannya. Maka sehubungan dengan permasalahan di atas penulis merumuskan bahwa Bagaimanakah Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial ?

1.4 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari semua permasalahan yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Kota Cilegon Sosial dalam Menangani Pekerja Seks Komersial.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menangani permasalahan Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengembangan dari ilmu Administrasi khususnya disiplin ilmu yang terkait dengan Teori Organisasi.

- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon khususnya dalam menangani Pekerja Seks Komersial.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti dapat memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang Sosial .
 - b. Hasil – hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh instansi yang berkepentingan dalam meningkatkan Kinerja para pegawai Dinas Sosial dalam setiap bidangnya masing – masing.
 - c. Dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kota Cilegon dalam bidang pemberdayaan.
 - d. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran kepada pemerintah daerah terkait khususnya Kota Cilegon berkenaan dengan menangani Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang Masalah, yaitu menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif.
- 1.2 Identifikasi Masalah, yaitu mengidentifikasikan dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang akan diteliti.
- 1.3 Pembahasan Masalah, lebih difokuskan kepada masalah – masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti, dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan.
- 1.4 Perumusan Masalah, yaitu mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.
- 1.5 Tujuan Penelitian, yaitu mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.
- 1.6 Kegunaan Penelitian, menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.
- 1.7 Sistematika Penulisan, berisi sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI TEORI

Terdiri dari :

- 2.1 Deskripsi Teori, mengkaji berbagai teori dan konsep – konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan hipotesis.
- 2.2 Kerangka Berpikir, menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup :

- 3.1 Metode Penelitian, menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian.
- 3.2 Instrument Penelitian, menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen.
- 3.3 Informan Penelitian, menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal penelitian, penetapan populasi, dengan teknik pengambilan informan penelitian.
- 3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, menjelaskan teknik analisis dan disertai rasionalisasinya.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian, menjelaskan lokasi dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari :

4.1 Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi / sample.

4.2 Informan Penelitian, yaitu menjelaskan mengenai siapa saja yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.

4.3 Deskripsi Data, menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan.

4.4 Pembahasan, yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari :

5.1 Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat.

5.2 Saran – saran, berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2000:67), kinerja merupakan " Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan padanya". Sedangkan menurut Bernardin, John H. Dan Joyce E. A. Russel dalam Sedarmayanti (2007 : 260), menyatakan bahwa " *Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period*". Dimana kinerja merupakan hasil dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang terkait demi tercapainya tujuan dalam kurun waktu tertentu.

Hasibuan (2005:34) dalam mengemukakan kinerja yaitu " suatu hasil kerja yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu." Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004 :309), Kinerja merupakan " perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan."

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Armstrong dan Baron, dalam Wibowo, 2008 : 7), Lain hal menurut Mahsun (2006:25) mengungkapkan bahwa kinerja adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dari beberapa pengertian kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan potensi seseorang / kelompok dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan atas kemampuan dan pengalamannya yang kemudian dapat menghasilkan hasil kerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dalam organisasi. Misi dan Visi organisasi merupakan suatu acuan bagi para pegawai untuk menjalankan tugasnya. Bilamana Misi dan Visi suatu organisasi dapat tercapai dengan baik, maka kinerja yang dilakukan dapat tercapai dengan baik.

2.1.1.1 Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis dan proses sumber daya manusia. Kinerja memerlukan strategi, tujuan, dan integrasi. Strategi merupakan integrasi rencana tindak yang sangat luas untuk mencapai tujuan organisasi. karena strategi bersifat

terintegrasi, semua faktor atau variabel saling berhubungan dan memberikan kontribusi pada kinerja (Wibowo, 2008:81).

Sementara itu, Hersey, Blanchard, dan Johnson (1996:383), dalam Wibowo (2008), mengungkapkan bahwa Intergrasi tidak hanya diperlukan untuk menghadapi keadaan saat ini, tetapi lebih penting lagi untuk proses perubahan yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa depan organisasi.

Kinerja Organisasi adalah agregasi atau akumulasi kinerja semua unit – unit organisasi, yang sama dengan perjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut. Dengan demikian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen, dan kinerja setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi antara lain dalam penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi, dan penyediaan prasarana dan sarana kerja (Simanjuntak, 2005 : 3-4).

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja di dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang ada dalam organisasi tersebut dan terdapat faktor – faktor yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan adanya kerjasama antara kelompok maupun individu dalam organisasi, maka akan tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan strategi – strategi atau tindakan yang tepat untuk mencapai kinerja yang baik, dimulai dari penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi,

dan penyediaan prasarana dan sarana kerja, agar tidak terjadi tumpang tindih atau tidak seimbang beban kerja yang di tanggung sehingga dapat menyebabkan kinerja organisasi menjadi rendah dan kelambatan dalam pelaksanaan operasional.

2.1.1.2 Faktor – faktor Kinerja

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2008:74), adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Personal, ditunjukan oleh keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
- b. Faktor Kepemimpinan, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c. Faktor Tim, ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
- d. Faktor Sistem, ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e. Faktor Kontekstual / Situasional, ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Menurut Mangkunegara (2001 : 67) faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah :

1. Faktor Kemampuan
Secara umum kemampuan ini terbagi menjadi dua yaitu : kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan reality (*knowledge dan skill*). Seorang dosen seharusnya memiliki kedua kemampuan tersebut agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan formal minimal S2 dan memiliki kemampuan mengajar dalam mata kuliahnya.
2. Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang pekerja yang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi bagi dosen sangat

penting untuk mencapai misi dan visi intuisi pendidikan. Menjadi dosen hendaknya merupakan motivasi yang terbentuk dari awal (*by plan*), bukan karena keterpaksaan atau kebetulan (*by accident*).

Menurut Rucky (2001:38) , ada dua komponen penting yang dikandung dalam kinerja, yaitu :

1. Kompetensi, berarti individu atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.
2. Produktivitasnya, berarti kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu faktor kepemimpinan, motivasi, kompetensi, dan sistem. Kepemimpinan merupakan faktor yang dsangat mendorong dalam melakukan suatu tugas, kepemimpinan yang baik dan terorganisir maka akan menghasilkan suatu kinerja yang baik pula, selain kepemimpinan faktor motivasi pun mempengaruhi suatu kinerja seseorang, kepemimpinan yang baik dan dilandaskan dengan motivasi dari seorang pimpinan yang dapat memacu tingkat kinerja pegawainya akan menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu juga kompetensi merupakan faktor yang mendukung untuk mengetahui hasil kerja seseorang, dengan adanya kompetensi maka seseorang dapat terlihat kinerjanya, kompetensi yang diberikan dapat menaikkan jabatan seseorang. Dan yang terakhir adalah sistem, dimana suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem yang dipakai dapat terarah dan sistematis.

2.1.1.3 Indikator Kinerja

Terdapat tujuh indikator kinerja. Dua diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan standar. Namun, kinerja juga memerlukan adanya dukungan alat / sarana, kompetensi, motif, peluang, dan umpan balik (Hersey, Blanchard, dan Johnson, dalam buku Wibowo 2007 : 77) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tujuan, merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
- c. Alat atau Sarana, merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau Sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana harusnya. Tanpa alat dan sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
- d. Kompetensi, merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang

- diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif.
- f. Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
 - g. Umpan Balik, antara tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Dari Indikator Kinerja diatas, jelas yang sangat berpengaruh adalah Tujuan dan Standar. Dimana suatu organisasi dapat dikatakan berhasil bila pencapaian tujuannya dapat tercapai dengan baik, tanpa mengabaikan standar organisasi yang ada.

Menurut Sedarmayanti (1995:53), yang dimaksud dengan kinerja suatu organisasi meningkat dengan memenuhi indikator – indikator antara lain:

1. Kualitas hasil kerja (*quality of work*)
Kualitas kerja dalam organisasi yang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu adanya suatu pengertian kepada kepentingan masyarakat. Apabila masyarakat merasa puas dalam hal pelayanan maka itulah yang disebut dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Kelancaran dan Ketepatan Waktu
Dalam melaksanakan pekerjaan tentunya ada aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelancaran dan ketepatan dalam suatu pekerjaan adalah bagian dari perencanaan,

pelaksanaan dan aturan yang dilaksanakan dengan baik dan penuh disiplin.

3. **Prakarsa dan inisiatif**
Prakarsa dan ide pemikiran untuk memajukan hasil kerja agar lebih baik, hal ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Hasil kerja, inisiatif dan ide – ide yang baik disambut dengan baik pula.
4. **Kecakapan atas kemampuan**
Kecakapan pada setiap individu dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk mencapai efektifitas kerja, dengan kecakapan segala pekerjaan akan lebih mudah dan hambatan dalam pekerjaan akan semakin kecil. Kecakapan akan diperoleh melalui pendidikan, latihan dan kursus.
5. **Komunikasi yang baik**
Suatu kecakapan utama dari setiap individu adalah kemampuan organisasi untuk berkomunikasi dalam suatu organisasi.

2.1.1.4 Pelaksanaan Kinerja

Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Bagaimana pemimpin menjalani hubungan dengan pekerja, bagaimana mereka memberi penghargaan kepada pekerja yang berprestasi, bagaimana mereka mengembangkan dan memberdayakan pekerjanya, sangat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia yang menjadi bawahan.

Demikian pula lingkungan kerja atau situasi kerja sangat berpengaruh dalam kinerja organisasi. Kenyamanan lingkungan kerja dapat mendorong tingkat kinerja pegawai. Juga termasuk bagaimana kondisi hubungan antarmanusia di dalam organisasi, baik antara atasan dengan bawahan maupun diantara rekan sekerja.

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu :

- a. Pernyataan tentang maksud dan nilai – nilai
- b. Manajemen Strategis
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia
- d. Pengembangan Organisasi
- e. Konteks Organisasi
- f. Desain Kerja
- g. Fungsional
- h. Budaya
- i. dan Kerjasama (Wibowo, 2008 :67)

2.1.1.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang di tentukan atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur.

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara :

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi.
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.
(Wibowo, 2008 : 320)

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001), dalam Wibowo (2007:320), Orang melakukan pengukuran kinerja perlu memenuhi persyaratan, diantaranya :

1. Dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi kepentingan individu
2. Mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja
3. Mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya
4. Harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar.

Thor mengemukakan adanya tiga dasar pengembangan ukuran kinerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Armstrong dan Baron, 1998 :270, dalam Wibowo, 2008 : 322), yaitu sebagai berikut :

- a. Apa yang diukur semata – mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan penting oleh pelanggan.
- b. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan rencana strategis mengindikasikan apa yang harus diukur.
- c. Memberikan perbaikan kepada tim dengan mengukur hasil dari prioritas strategis, memberi kontribusi untuk perbaikan lebih lanjut dengan mengusahakan motivasi tim, dan informasi tentang apa yang berjalan dan tidak berjalan.

Tujuan kinerja adalah untuk memberikan bukti apakah hasil yang diinginkan telah dicapai atau belum . Pengukuran kinerja dilakukan agar selama pelaksanaan kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan tujuan.

2.1.2 Penyakit Sosial

Penyakit sosial yang merupakan kebiasaan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik pada masyarakat tradisional, [desa](#), [kota](#), maupun pada [masyarakat](#)

modern. Berbagai perilaku individu terkait erat satu sama lainnya dalam setiap kelompok atau masyarakatnya. Masyarakat adalah suatu kelompok sosial yang terdiri atas kumpulan beberapa individu yang hidup bersama dan menjalin interaksi sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu yang relatif lama.

Dalam proses sosialisasi di masyarakat, disadari ataupun tidak disadari seseorang pernah melakukan tindakan penyimpangan sosial, baik dalam skala besar ataupun kecil. Perilaku menyimpang apabila dilakukan secara intens dan dalam skala yang besar bisa berubah menjadi penyakit sosial. Seperti halnya dengan tubuh yang selalu menghadapi kemungkinan adanya berbagai jenis penyakit yang berpengaruh terhadap kesehatan, di tengah masyarakat juga terdapat berbagai jenis penyakit yang dapat merongrong kondisi keharmonisan dan keteraturan sosial. Hal-hal yang dapat mengakibatkan situasi lingkungan masyarakat yang tidak sehat disebut sebagai penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan bentuk kebiasaan berperilaku sejumlah warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat. Salah satu penyakit sosial yang terjadi dikalangan masyarakat, yaitu: AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat infeksi human immunodeficiency virus (HIV). Tubuh yang terserang AIDS akan rentan terhadap infeksi penyakit, sehingga mengakibatkan kematian. Saat ini, AIDS telah tersebar luas di seluruh dunia, termasuk di Kota Cilegon. Virus

HIV tersebar melalui pertukaran cairan tubuh, seperti darah, sekreta dari alat kelamin (cairan semen dan cairan vagina), dan air susu. Oleh sebab itu, HIV menular lewat hubungan [seksual](#) dengan penderita HIV (baik melalui anus atau vagina), kontak melalui darah dan produk-produk darah (misalnya serum), serta kegiatan menyusui dari ibu penderita HIV kepada anak yang disusunya (Diega Iqbal : 2010).

2.1.3 Kebijakan Sosial

Menurut Spicker dalam Suharto (1997), Kebijakan Sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat. Lain hal dengan Huttman dalam Suharto (1997), Kebijakan Sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2006), mengungkapkan bahwa : *"In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs"*. Yang berarti, Kebijakan Sosial secara singkat menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Menurut Magill dalam Suharto (2005) . Kebijakan Sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (*militer*), serta fasilitas - fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Sedangkan Marshall (1965) dalam Suharto (2005), Kebijakan Sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Menurut Rein dalam Suharto (2005), Kebijakan Sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.

Menurut Suharto (2005), Kebijakan Sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Menurut Ealau dan Pewitt dalam Suharto (2005), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss dalam Suharto (2005) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut David Gil dalam Suharto (2005), untuk mencapai tujuan – tujuan kebijakan sosial, terdapat perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, yaitu yang menyangkut :

1. Pengembangan sumber – sumber
2. Pengalokasian status
3. Pendistribusian hak

Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan – tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau

mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat (misalnya kenakalan remaja). Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan – pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbul lagi masalah, atau mencegah eluasnya masalah) atau pengembangan (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya)

2.1.4 Pekerja Seks Komersial (PSK)

Lener dalam bukunya yang berjudul *"The Creation of Partiachy"* (Petra, 2007) menyatakan bahwa bentuk pelacuran tertua ditemukan di Negara – negara kuno seperti di India dan Babilonia kuno. Di Babilonia kuno, para perempuan berafiliasi dengan candi melakukan hubungan seksual dengan orang – orang asing yang mengunjungi candi tersebut untuk memuja kesuburan dan kekuasaan seksual para dewi. Imbalan yang diberikan merupakan sumbangan bagi candi. Para perempuan ini memiliki akses terhadap tanah, budak dan menikmati pratise sosial.

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal – hal yang berhubungan dengan perkara – perkara hubungan intim antara laki – laki dan perempuan.

Menurut Hurlock (1991), seorang ahli psikologi perkembangan, yang mengemukakan tanda – tanda kelamin sekunder yang penting pada laki – laki dan perempuan. Seiring dengan pertumbuhan primer dan sekunder pada remaja ke arah kematangan yang sempurna, muncul juga hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya.

PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut (Koentjoro, 2004:26). Di beberapa negara istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk – bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama. Obyek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Pekerja seks komersial kebanyakan terjadi pada remaja yang diawali dengan terjadinya pergaulan kearah seks bebas. Dimana faktor – faktor pendukung seorang remaja melakukan seks adalah sebagai berikut :

- 1) Tekanan yang datang dari teman pergaulannya
Lingkungan pergaulan yang dimasuki oleh seorang remaja dapat juga berpengaruh untuk menekan temannya yang belum melakukan hubungan seks, bagi remaja tersebut tekanan dari teman-temannya yaitu dirasakan lebih kuat dari pada yang didapat dari pacarnya sendiri.
- 2) Adanya tekanan dari pacar
karena kebutuhan seorang untuk mencintai dan dicintai, seseorang harus rela melakukan apa saja terhadap pasangannya, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya. dalam hal ini yang berperan bukan saja nafsu seksual, melainkan juga sikap memberontak terhadap orang tuanya. Remaja lebih membutuhkan suatu hubungan, penerimaan, rasa aman, dan harga diri selayaknya orang dewasa.
- 3) Adanya kebutuhan badaniah
Seks menurut para ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, jadi wajar jika semua orang tidak terkecuali remaja, menginginkan hubungan seks ini, sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak sepadan dengan resiko yang akan dihadapinya.
- 4) Rasa penasaran
Pada usia remaja, keingintahuannya begitu besar terhadap seks, apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa terasa nikmat, ditambah lagi adanya informasi yang tidak terbatas masuknya, maka rasa penasaran tersebut semakin mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 5) Pelampiasan diri
faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur berbuat, seorang remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan yang akan menjerumuskannya dalam pergaulan bebas.

Faktor lainnya datang dari lingkungan keluarga. bagi seorang remaja mungkin aturan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya tidak dibuat berdasarkan kepentingan kedua belah pihak (orang tua dan anak), akibatnya remaja tersebut merasa tertekan sehingga ingin membebaskan diri dengan menunjukkan sikap sebagai pemberontak, yang salah satunya dalam masalah seks. (<http://www.univrab.ac.id>)

2.2 KERANGKA BERPIKIR

Dari Teori-Teori di atas penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah potensi seseorang / kelompok dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan atas kemampuan dan pengalamannya yang kemudian dapat menghasilkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Kinerja di dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang ada dalam organisasi tersebut dan terdapat faktor – faktor yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan adanya kerjasama antara kelompok maupun individu dalam organisasi, maka akan tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan strategi – strategi atau tindakan yang tepat untuk mencapai kinerja yang baik, dimulai dari penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi, dan penyediaan prasarana dan sarana kerja, agar tidak terjadi tumpang tindih atau tidak seimbang beban kerja yang ditanggung sehingga dapat menyebabkan kinerja organisasi menjadi rendah dan kelambatan dalam pelaksanaan operasional. Untuk mengukur Kinerja Dinas Sosial, peneliti menggunakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Masyarakat, karena hal tersebut dapat mendukung pencapaian jawaban yang terbaik dengan menggabungkan pandangan PSK dan Masyarakat atas Kinerja Dinas Sosial.

Masalah yang saat ini dirasakan yaitu Adanya peningkatan jumlah Pekerja Seks Komersial dari tahun 2009 hingga tahun 2012 di Kota

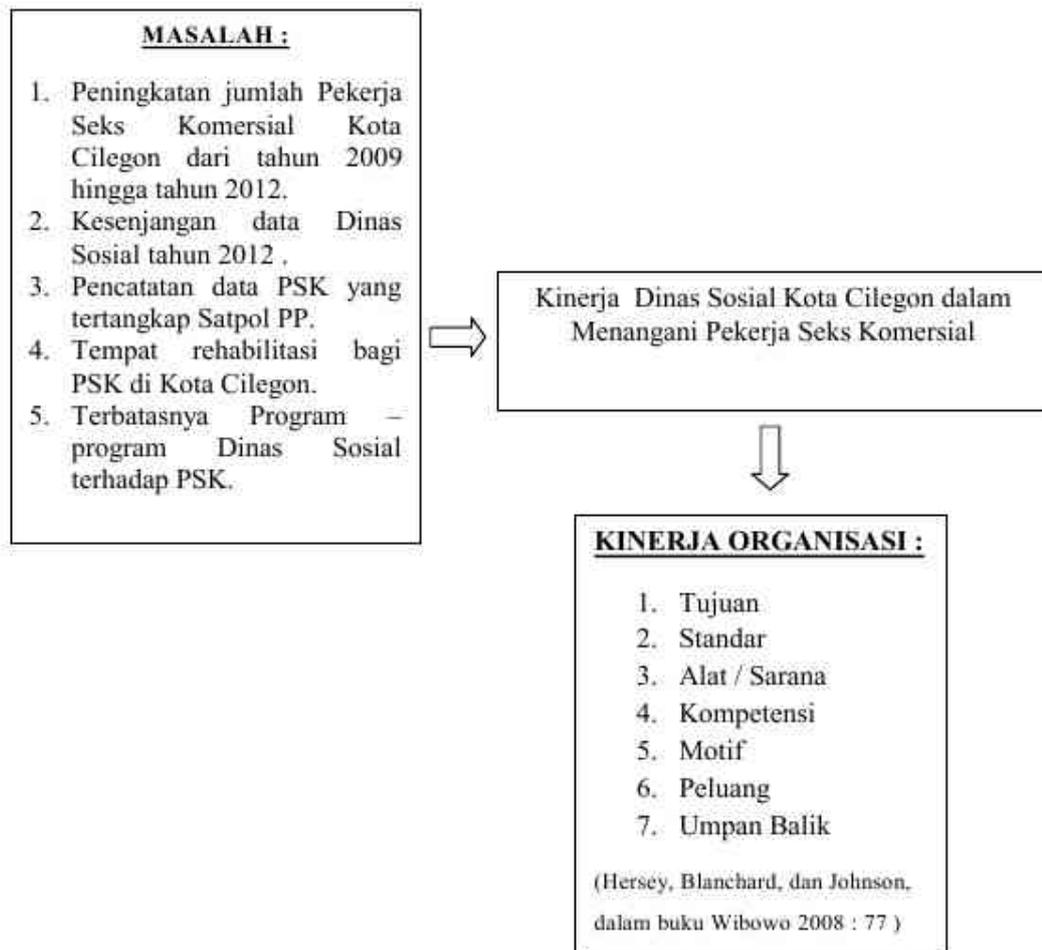
Cilegon. Semakin tinggi penyakit HIV / AIDS yang dapat menular dan mematikan bagi PSK, Adanya kesenjangan data Dinas Sosial tahun 2012 dengan data yang ada di lapangan, Ketidakjelasan dalam pencatatan data PSK yang tertangkap Satpol PP, Belum adanya tempat Rehabilitasi bagi PSK di Kota Cilegon serta Terbatasnya program – program yang diberikan Dinas Sosial terhadap PSK.

Dari berbagai masalah sosial di atas, maka dibutuhkan Kinerja Dinas Sosial yang maksimal dalam menangani permasalahan PSK tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa poin yang menjadi titik acuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial dengan menggunakan indikator kinerja organisasi menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo, 2008 : 77), diantaranya :

1. **Tujuan** (Berkaitan dengan tujuan Dinas Sosial dalam menangani PSK)
2. **Standar** (Berkaitan dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dinas Sosial)
3. **Alat / Sarana** (Alat/Sarana yang dipakai Dinas Sosial untuk menangani PSK)
4. **Kompetensi** (Apakah Dinas Sosial memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya)
5. **Motif** (Bagaimana cara Dinas Sosial dalam memberikan motivasi bagi PSK)
6. **Peluang** (Kesempatan yang diberikan dinas sosial kepada PSK)
7. **dan Umpan balik** (Kelayakan hidup yang dirasakan PSK dari dinas Sosial)

Dari ketujuh indikator Kinerja Organisasi di atas diharapkan dapat memberikan keluaran yang positif bagi PSK seperti Rehabilitasi, Kelayakan Hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan Wirausaha

yang dapat dilakukan oleh PSK setelah keluar dari rehabilitasi. Kerangka berpikir yang dipakai dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon dapat digambarkan seperti di bawah ini :



GAMBAR 2.1 SKEMA KERANGKA BERPIKIR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono 2008:2).

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007 : 6).

Kemudian menurut David William dalam Moleong (2007:5), menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah.

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon yang instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Sugiyono (2003 :31) meneliti adalah "mencari data yang teliti atau akurat". Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus " divalidasi ". Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Sama halnya dengan pendapat Irawan (2006 : 17) yang menyatakan bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrument terpenting adalah peneliti sendiri. Sedangkan menurut Moleong (2007 : 19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam rangka mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih utuh dan alamiah dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, diantaranya :

1. Observasi

Menurut Moleong, observasi adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*).

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi dan pengamatan, seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007 :126), diantaranya :

- a. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan – jangan pada data yang didapatnya ada yang bias.
- e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi – situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. Dalam kasus – kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu pada Dinas Sosial dan kawasan tempat berkumpulnya para Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2007:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakuka oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Benny dan Hughes menjelaskan bahwa wawancara adalah:

*“Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus-menerus memberikan keasyikan, sehingga kita berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara”
(Black dan Champion, 2001 : 305)*

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur, pertanyaan-pertanyaan tidak diatur dalam suatu urutan atau aturan yang khusus. Apa yang ditanyakan dalam wawancara mungkin dimulai dari tengah atau dari bagian akhir.

3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi.

4. Studi Dokumentasi

Studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, laporan – laporan berupa foto atau dokumen elektronik (rekaman), catatan serta dokumen – dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif informan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Populasi yang digunakan adalah populasi sasaran karena kejelasan populasi yang diteliti yaitu, Dinas Sosial dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Key informan atau kunci informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu informan Primer adalah Pegawai Dinas Sosial dan Pekerja Seks Komersial (PSK), Untuk informan sekundernya yaitu, Masyarakat dan LSM.

Tabel 3.1

Kategori dan Spesifikasi Informan

No.	Kategori Informan	Spesifikasi Informan
1.	Dinas Sosial	Kabid dan Kasie Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Staff
2.	Satpol PP , Dinas Kesehatan	Kasie dan Dokter
3.	Pekerja Seks Komersial	Kelas Bawah (<i>Low Class</i>), Kelas Menengah (<i>Midle Class</i>), dan Mantan PSK
4.	Masyarakat	LSM

(Sumber : Peneliti, 2012)

Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial, penentuan informannya menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008 : 219).

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

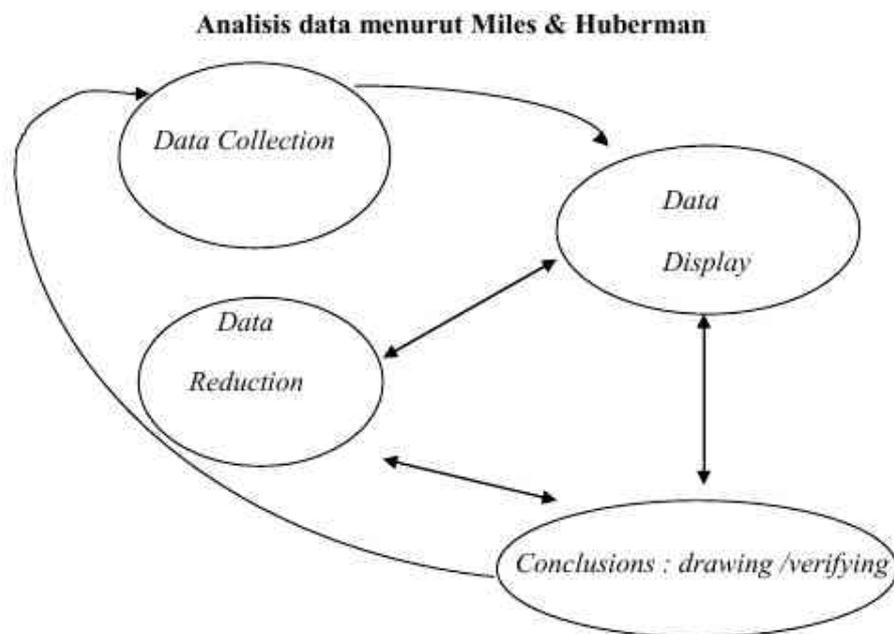
Dalam penelitian ini data yang digunakan masih data mentah dan harus diolah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, jika dilihat dari sumbernya. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Tujuan dari teknik deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam misalkan dengan observasi, wawancara, dokumen – dokumen serta bahan visual. Dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.

Dalam prosesnya Analisis data dalam proses ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008 :246), yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Selain itu juga Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam

analisis data, yaitu data *reduction* , *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak seperti berikut :



(Sumber : Sugiyono, 2008 : 247)

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian – bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang di katakan oleh Miles and Huberman (1992) dalam Sugiyono (2008) , ” *the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text* ” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam tahap analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data,

peneliti mulai mencari arti dari hubungan – hubungan, mencatat keteraturan, pola – pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti – bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya guna memastikan keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu adanya mengadakan pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara kemudian membandingkan dari hasil wawancara kepada beberapa informan. Adapun maksudnya adalah agar terdapat kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran antara peneliti dengan informan. Akhirnya penelitian terjawab menurut prinsip kebenaran senyatanya (*the really truth*) sebagai temuan dan sumbangan penelitian bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthines*) maka diperlukan pengujian dalam keakuratan data. Terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk menguji keakuratan penelitian kualitatif. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

3.5.1 Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moleong (2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.

- 1) Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- 2) Triangulasi metode yaitu terdapat dua strategi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama
- 3) Triangulasi penyidik yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- 4) Triangulasi teori menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam teknik triangulasi sumber, proses triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data Pekerja Seks Komersial hasil pengamatan dilapangan dengan hasil wawancara Dinas Sosial serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sedangkan dalam teknik triangulasi metode, proses triangulasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan, yaitu dengan metode wawancara Dinas Sosial dan melakukan observasi terhadap Pekerja Seks Komersial.

3.5.2 Mengadakan Pengecekan (*Membercheck*)

Pengecekan dengan informan yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Para pegawai yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan peneliti. Pengecekan pegawai dapat dilakukan baik secara formal maupun secara tidak formal. Ikhtisar wawancara dapat diperlihatkan untuk dipelajari oleh satu atau beberapa pegawai yang terlibat, dan mereka diminta pendapatnya.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Dinas Sosial Kota Cilegon

3.5.3 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011 – 2012 dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

kegiatan	2011				2012												
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
Acc Judul	■																
Pengumpulan Data dan Observasi Awal	■	■															
Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■								
Bimbingan dan Perbaikan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal									■								
Revisi Proposal									■	■	■	■	■	■			
Penyelesaian Penelitian													■	■	■	■	■
Sidang Skripsi dan Revisi														■	■	■	■

(Sumber : Peneliti 2012)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial

Pada tahun 1999 sampai dengan 2007 Dinas Sosial masih bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja, yang disingkat menjadi DINSOSNAKER. Tahun 2008 Dinas Sosial memisahkan diri dari Dinas Tenaga Kerja, dan berdiri sendiri. Walikota Cilegon menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2008.

Bedasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dijelaskan bahwa Sosial dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 38 Tahun 2008 adalah memberikan bantuan atau perlindungan melalui kegiatan Pelayanan, Rehabilitasi, Jjaminan, dan Pembinaan yang berkenan dengan masyarakat. Pelayanan Sosial meliputi pelayanan kepada orang terlantar dalam perjalanan, lansia terlantar, tindak kekerasan pekerja migrant (KTK-PM), orang terlantar meninggal, perlindungan balita dan anak terlantar. Rehabilitasi penyandang masalah sosial meliputi gepeng, penyandang cacat, eks napza, eks narapidana, fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi.

Menurut Peraturan Walikota Cilegon Nomor 38 Tahun 2008 Bagian Ketiga Pasal 12, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan Penyusunan Program dan Pengendalian Anggaran Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Mengkoordinir, Menyelenggarakan, dan Mengawasi serta Mengevaluasi Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial melakukan beberapa pembinaan bagi Pekerja Seks Komersial yang terjaring oleh petugas SATPOL PP. Razia yang dilakukan oleh SATPOL PP biasanya 3(tiga) bulan sekali, dimana SATPOL PP mempunyai titik lokasi tertentu dalam melakukan razia di Kota Cilegon, meliputi : Lingkar Selatan, Statomer Merak, Warung Remang – Remang dekat Rel Merak. Ciwandan / Cigading. Sebelum melakukan razia SATPOL PP mengadakan rapat terlebih dahulu agar penjaringan terhadap PSK dapat dilakukan secara baik dan terarah, namun nyatanya razia yang dilakukan SATPOL PP terkadang bocor atau sudah diketahui oleh PSK terlebih dahulu. Sehingga keberadaan PSK yang biasa manggal ditempat tertentu sudah tidak ada dan alhasil,

penjaringan pun hanya mendapatkan beberapa PSK saja, tidak sepenuhnya PSK dapat terjaring.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan PERDA, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Dinas Sosial selalu bekerjasama dengan SATPOL PP dalam melakukan penertiban terhadap PSK. SATPOL PP mempunyai anggaran tersendiri dalam melakukan razia terhadap Pekerja Seks Komersial.

Selama masa Kepemimpinan 5 (lima) tahun ini, Dinas Sosial Kota Cilegon mempunyai prosedur kerja untuk menangani Pekerja Seks Komersial yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahunnya agar tercapai tujuan hingga 100%, Dinas Sosial menetapkan 20% dalam setahun untuk menangani Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon yang akan dibina, dikarenakan dana yang sangat minim. Dengan begitu dalam jangka 5 tahun PSK dapat ditangani Dinas Sosial hingga 100%. PSK yang terjaring oleh SATPOL PP, langsung diberikan kepada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial mendata nama dan alamat PSK tersebut. PSK yang berada di Kota Cilegon kebanyakan bukan asli orang Cilegon, namun berasal dari beberapa daerah, seperti : Lampung, Subang, Indramayu dan Pandeglang. Dinas Sosial Kota Cilegon beranggotakan 38 Orang, dimana Bidang Rehabilitasi memiliki Staf 2 orang dan Kasie 1 orang, sedangkan Bidang Pelayanan Sosial memiliki Staf 4 orang dan Kasie 1 orang.

TABEL 4.1
PEGAWAI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON

No.	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Sri Haryanto AN	Kepala Dinas
2	Sakiman, SH, MSi	Sekretaris
3	Linda, SH	Kabid Pemb. Tenaga & Lembaga Sosial
4	Drs. Tb Achmad Taufik	Kabid Bantuan Jaminan Sosial
5	M. Sudaryo, SE, M.Si	Kabid Pelayanan & Rehabilitasi Sosial
6	Dra. Hj. Iim Rokhimah, M.Si	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	Hj. Suhartini, S.Sos	Kasubag Keuangan
8	Hj. Ely Artiningsih, Sh	Kasubag Program & Evaluasi
9	Saripudin	Kasi Pemb. Tenaga & Nilai – Nilai Sosial
10	Dra. Yuadhita Brotorini	Kasi Pemb. Lembaga Sosial
11	Ida Kristiyanti, SE., M.Si	Kasi Pelayanan Sosial & Pemakaman
12	Asep Saifulloh, S.Ag., M.Si	Kasi Rehabilitasi Sosial
13	Mamat Slamet, S.Sos, MM	Kasi Jaminan Sosial
14	Amirul Mukminin, S.Sos., M.Si	Kasi Bantuan Sosial

(Sumber : Dinas Sosial 2009)

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, menyatakan bahwa :

1. Pasal 12 dan 13 : Bidang pelayanan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Bidang pelayanan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan mengendalikan anggaran Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap – tiap seksi pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- d. Penyelenggaraan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- e. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :

- 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial
2. Pasal 14 dan 15 : Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman

Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing

bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman;
- c. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Penganalisaan Data pada Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman;
- d. Penyiapan bahan Pelayanan Penyelenggaraan di bidang Pelayanan Sosial dan Pemakaman;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan sosial dan pemakaman;
- f. Pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan pemakaman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di bidang pelayanan sosial dan pemakaman;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman.

3. Pasal 16 dan 17 : Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Rehabilitasi Sosial sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Rehabilitasi Sosial;
- d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. Pelaksanaan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di bidang Rehabilitasi Sosial;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi Sosial.

4.1.3 Gambaran Umum Lokasi dan Praktek Prostitusi

Lokasi penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial yang bertempat pada Jalan Pasar Baru No. 01, Kecamatan Jombang, Kelurahan Sukmajaya dan peneliti juga melakukan penelitian terhadap Pekerja Seks Komersial di berbagai tempat – tempat hiburan di Kota Cilegon, Seperti : Regent, Dinasti, Target, Warung remang – remang dan di Sepanjang Pinggiran jalan Kota Cilegon.

Tempat – tempat hiburan merupakan tempat bagi para Pekerja Seks Komersial untuk menjajakan dirinya, menghibur dan melayani para kaum laki – laki untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi. Tempat ini biasanya buka dari jam 21.00 malam sampai dengan jam 02.00 pagi. Pada pagi hari tempat – tempat hiburan Regent dan Dinasti hanya buka untuk karaoke atau hotel saja, sedangkan target buka pada siang hari jam 12 siang sampai jam 01.30 malam. Target merupakan tempat hiburan yang di fasilitasi dengan meja – meja bilyard, musik – musik DJ, para Marki, dan 4 box karokean di dalamnya. Tempat hiburan ini yang paling sering dikunjungi oleh para Pekerja Seks Komersial kalangan bawah, dimana usia mereka banyak yang masih dibawah umur. Kebanyakan PSK yang ada di Target diajak untuk berkaraoke dalam box atau bermain bilyard,

diberi minum bir sampai mabuk, dan kemudian diajak ke suatu tempat untuk berhubungan badan. Biasanya tarif PSK ini hanya Rp. 50.000 s/d Rp. 200.00 atau dibayar dengan rokok / bir.

Regent dan Dynasty merupakan tempat hiburan yang di fasilitasi oleh Room Karokean, Musik Dugem dan DJ, Bar, Hotel, serta Meja – meja yang digunakan untuk menikmati musik sambil bergoyang. Lampu yang hanya remang – remang ditambah dengan proyektor cahaya dari berbagai sudut yang berkelap – kelip, musik yang dipasang keras – keras pun selalu menemani malam yang indah bersama dengan para PSK yang telah disediakan oleh para mami untuk melayani dan menghibur para tamu yang datang. Tak ketinggalan juga berbagai bir yang ditawarkan oleh pelayan menambah suasana semakin panas. Selain tempat hiburan dan karaoke, Regent juga memiliki beberapa hotel di dalamnya, hotel ini disediakan untuk para tamu yang tak ingin pulang dan para tamu yang ingin melewati malamnya bersama dengan seorang PSK. 1 (satu) kamar hotel ini kenakan biaya Rp. 200.000. PSK yang berada dalam tempat hiburan ini merupakan PSK dari kalangan menengah yang bertarif ± Rp. 225.000 sampai dengan Rp. 500.000 lain hal dengan Tip yang diberikan oleh para tamu kepada PSK bisa mencapai ±Rp. 300.000. Sedangkan Dynasty merupakan tempat hiburan yang bertaraf internasional, yang memiliki tempat karaoke, hotel dan tempat clubing. Room karaoke yang dimiliki oleh Dynasty 20 room, setiap room berbeda – beda harganya. Ada yang perpaket Rp. 750.000 (sudah dapat free room, minuman, snack dan

wanita) sampai tutup. Room lainnya yaitu room berjalan minimum cash 2 jam per room, Room yang kecil kena biaya Rp. 200.000, Room sedang Rp. 300.000, Room besar Rp. 400.000.

Dinasty juga memiliki PSK yang bertarif Rp 240.000 per calling. Dinasty juga memiliki PSK yang bertarif atas yaitu Rp. 500.000 s/d Rp.800.000. PSK yang berkalangan atas ini biasanya hanya orang – orang tertentu saja, seperti Mahasiswa. Tamu yang ingin memboking atau memakai PSK kalangan atas ini biasanya harus buat janji dulu dengan para maminya. Sehingga mami dapat mengatur pertemuan tamu dan PSK tersebut dan itu hanya melalui telepon gengam saja. Jika semua administrasi sudah di selesaikan oleh tamu, maka mami akan mengontak PSK-nya untuk menemani atau melayani tamunya di tempat yang telah disepakati oleh mami dan si Tamu tersebut. PSK kalangan atas sangatlah sulit untuk ditangkap atau dirazia oleh SATPOL PP, dikarenakan mereka hanya berkomunikasi melalui telepon gengam (*Handphone*).

Tabel 4.2 Karakteristik PSK

Tarif PSK Rata - Rata	Jenis PSK	Keterangan
Rp. 50.000 s/d Rp. 200.000	Kelas Rendah <i>(Low Class)</i>	Yang ada di Pinggiran jalan dan tidak memiliki mami
Rp. 250.000 s/d Rp.	Kelas Menengah	Yang ada di Tempat

400.000	<i>(Middle Class)</i>	Hiburan dan memiliki Mami
Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 keatas	Kelas Atas <i>(High Class)</i>	Mahasiswa, hanya berhubungan melalui Telepon genggam

(Sumber : Peneliti 2012)

Cafe atau istilah bagi kaum PSK adalah Warung remang – remang yang berada di bawah Jembatan Tol yang menuju ke arah pintu masuk Tol Serang Timur merupakan salah satu tempat beredarnya PSK. Cafe yang disediakan mami ini beda dengan cafe – cafe lainnya yang ada di Kota Cilegon, cafe yang resmi atau yang wajar disebut cafe adalah cafe yang hanya untuk orang – orang nongkrong atau sekedar untuk santai sambil minum kopi, tapi beda dengan cafe yang ada di bawah jembatan tol ini. Cafe yang dimaksud adalah tempat yang remang – remang dengan alunan musik yang keras dan lampu – lampu yang kelap kelip dari berbagai sudut, sofa – sofa yang disediakan untuk para tamu duduk sambil mendengarkan musik atau para tamu yang ingin berkaraoke, minuman bear juga tidak ketinggalan disediakan di tempat ini, ditambah lagi dengan wanita – wanita yang siap melayani dan menemani tamu dengan pakaian yang seksi, highhills yang tidak kurang dari 7-12cm yang biasa disebut dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Tempat ini merupakan salah satu tempat para PSK untuk bernaung. Selain membuka membuk cafe, warung

ini juga membuka usaha warung kecil – kecilan seperti warung makan, warung rokok, dan warung pulsa. Dari depan warung ini terlihat seperti warung biasa, tetapi setelah ditelaah, ternyata warung remang – remang ini pun menyediakan kamar – kamar kecil yang disewakan untuk PSK melayani tamu dibelakang warung tersebut. PSK yang berada di warung remang – remang ini kalangan rendah.

4.2 Deskripsi Informan Peneliti

Seperti yang telah dijabarkan dalam bab 3, bahwa dalam penelitian Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial, penentuan informannya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008 : 219).

Selanjutnya perlu diketahui, adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, yakni :

1. Bapak Sudaryo, beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
2. Bapak Asep Saifulloh, beliau adalah Kasie Rehabilitasi Sosial.
3. Ibu Eha, beliau adalah staff Rehabilitasi Sosial lapangan.

4. Kity (nama samaran), seorang PSK menengah yang berasal dari Lampung dan berusia 19 tahun yang suka mangkal di Regent.
5. Mbak Santi (nama samaran), seorang PSK kalangan rendah yang suka mangkal di Simpang, Cilegon.
6. Mami Uni (nama samaran), beliau yang mempunyai warung remang – remang di sekitar jembatan layang depan Hotel Mangku Putra.
7. Mami R (nama samaran), beliau mami atau pemandu lagu di salah satu tempat Hiburan .
8. Borju (nama samaran), Mantan seorang PSK bawah yang mangkal di sepanjang pinggiran jalan Kota Cilegon.
9. Bapak Mamak, beliau Mantan Lurah dan Ketua DPM daerah Simpang.
10. Bapak Rahmat, beliau yang menjabat sebagai Ketua RT di Sumampir, Cilegon.
11. Mbak A (nama samaran), beliau mantan PSK yang sekarang bekerja di salon merak.
12. Mbak X (nama samaran), beliau yang mempunyai warung disekitar daerah rel kereta Statomet.
13. Mbak R (nama samaran), beliau yang mempunyai Salon R di Merak. Salon ini digunakan untuk pembinaan Dinas Sosial.

14. Mbak Pujiyanti, Pembantu Rumah Tangga yang mengikuti Pembinaan di Rina Salon Merak
15. Mbak Evi, Ibu Rumah Tangga yang mengikuti Pembinaan di Rina Salon Merak
16. Bapak Tri, beliau salah satu Staff di Dinas Kesehatan daerah Merak.
17. Hasuri, selaku Ketua PK KNPI Jombang.
18. Mas Romi, selaku pelanggan PSK di daerah Merak Statomet.
19. Bapak Endang Sudrajat, selaku Kasie Trantib Keamanan Satpol PP
20. Drg Ratih Purnamasari, M.K.M, selaku kasie P2 Dinas Kesehatan
21. Ibu Aning, peserta pembinaan Tataboga

4.3 Deskripsi Data

Dalam Deskripsi Data penelitian ini peneliti mendeskripsikan data dengan menggunakan konsep Kinerja Organisasi Hersey, Blanchard, dan Johnson, dalam buku Wibowo (2008:77) yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu : Tujuan, Standar, Alat/Sarana, Kompetensi, Motif, Peluang dan Umpan Balik. Konsep Kinerja Organisasi di atas akan dijabarkan oleh peneliti seperti yang di bawah ini:

4.3.1 Tujuan Dinas Sosial

Dalam melakukan tugas pokoknya Dinas Sosial selalu berpatokan dengan Visi dan Misi yang ada. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat merupakan Visi dari Dinas Sosial yang selalu ingin dicapai. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitas terhadap PMKS, Meningkatkan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Jaminan Sosial Penanggulangan Bencana, Terwujud Peningkatan Kinerja Kelembagaan SKPD untuk membentuk Layanan Sosial merupakan Misi dari Dinas Sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudaryo selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mengungkapkan bahwa :

"tujuan kami selalu menginginkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan kami selalu ingin meminimalisasikan PMKS di Kota Cilegon, Misi yang ada di Dinas Sosial belum semua tercapai baru 3 (tiga) yang terlaksana, Dinsos melakukan secara bertahap".⁶

Dari Misi yang diungkapkan di atas belum tercapai secara keseluruhan, hanya 3 (tiga) misi yang sudah dicapai yakni: Meningkatkan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Jaminan Sosial Penanggulangan Bencana, Terwujud Peningkatan Kinerja Kelembagaan SKPD untuk membentuk Layanan Sosial. Dinas Sosial melakukan secara bertahap dalam 1 periode

⁶ Wawancara dengan Bapak Sudaryo(I¹) selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 03 Juli 2012, di Kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

atau 5 tahun. Jadi dalam menangani PSK dilakukan bertahap setiap tahunnya mencapai 20 % sampai dengan 100% dalam 5 tahun.



GAMBAR 4.2 Pelatihan dan Keterampilan Dinas Sosial

Dinas Sosial mengadakan kegiatan tentang Pelatihan dan Keterampilan merias wajah dan salon sebanyak 25 orang. Tugas pokok Dinas Sosial adalah meminimalisasikan PSK di Kota Cilegon. Dinas Sosial selalu melakukan pendekatan persuasif terhadap PSK, PSK yang tertangkap oleh Satpol PP sebelum dibina dilakukan pendekatan dahulu dengan cara *face to face* dan mendengar keluhannya. Dinas Sosial juga selalu melakukan pendekatan terhadap Germo atau mami – mami, dengan cara mendatangi Germo atau mami – maminya tersebut agar mau bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengumpulkan PSK yang mau atau ingin dibina, Dinas Sosial melakukan pendekatan dengan Germo / Mami dengan memberikan dana atau kompensasi terhadap Germo / Mami tersebut untuk mengumpulkan PSK yang akan dibina. Sehingga setiap akan diadakan pembinaan Dinas Sosial langsung mendatangi para mami

untuk mengumpulkan 25 orang. Diharapkan PSK bisa berahli profesi dari PSK menjadi seorang yang mandiri yang mempunyai keahlian dalam membangun usaha salon atau merias wajah atau tata boga dan diharapkan tidak kembali lagi ke profesi sebelumnya. Namun kenyataannya bahwa tujuan Dinas Sosial untuk meminimalisir PSK belum dapat tercapai dengan baik. Dikarenakan patokan kuota dalam setiap diadakannya pelatihan dan pembinaan. Dimana, jumlah PSK setiap tahunnya semakin bertambah di Kota Cilegon dan semakin banyak yang berkeliaran diberbagai tempat di Kota Cilegon. Lain lagi dari ungkapan Ibu Eha, selaku Staff Rehabilitasi :

" kita ada mitra dengan germo itu, misalkan kita ada kegiatan tolong nanti saya minta orang 25. Ya mereka nanti yang akan membawa orang itu. Karena tadi itu kita pendekatan dulu. Jadi dia kenal dengan kita, makan nya mereka mau, kalo dia tidak kenal tidak mau.ada, itu udah masuk dalam kegiatan. Kita mengundang itu kan kita harus ada kompesasi donk, kita kasih makan, transport, dan lain-lain."⁷

Diketahui bahwa Dinas Sosial bekerjasama dengan Germo atau Mami dalam melakukan pembinaan dengan memberikan imbalan kepada Germo tersebut. Dari sini terlihat bahwa Dinas Sosial melakukan kegiatan pembinaan dengan bantuan germo, tidak membina PSK yang tertangkap dalam razia Satpol PP. Dikarenakan hasil razia PSK Satpol PP, berasal dari berbagai daerah yang hanya sekedar mangkal di Kota Cilegon. Sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan terhadap PSK yang tertangkap.

⁷ Wawancara dengan Ibu Eha Nursoleha (I¹) sebagai staf Rehabilitasi Sosial, 27 september 2012, di Kantor Dinas Sosial, pada pukul 11.00

Hal ini dapat menimbulkan kecurangan terhadap hasil laporan pembinaan yang akan diberikan kepada atasan. Dikarenakan dalam pembinaannya bisa jadi PSK yang dibina sudah berulang kali mengikuti pembinaan atau bahkan yang dibina buka PSK. Sedangkan PSK yang di luar sana masih banyak yang membutuhkan pembinaan dari Dinas Sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asep selaku Kasie Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa :

" PSK yang di Merak saja yang dibina, kalau yang disimpang itu liar dan bukan asli orang cilegon, umur yang produktif yang masih mau untuk kembali, yang ga mau mah ga di paksa, yang mau mau saja."⁸

Dari pernyataan di atas kenyataannya bahwa Dinas Sosial melakukan pembinaan hanya untuk PSK yang asli penduduk Cilegon dan hanya kalangan Merak saja yang dibina untuk pelatihan salon, itu pun tidak dengan paksaan untuk mengikuti pembinaan tersebut. Dari ungkapan itu terlihat bahwa tidak ada ketegasan dalam melakukan pembinaan terhadap PSK. Bila dilihat bahwa penduduk yang ada di Merak kebanyakan bukan asli Penduduk Kota Cilegon, mereka kebanyakan pendatang dari luar daerah yang sudah lama tinggal di Kota Cilegon. Sedangkan Kota Cilegon memiliki 8 Kecamatan yang mana dari setiap kecamatan tersebut terdapat PSK yang berkeliaran. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Pujiyanti yang dibina di "R" Salon, mengatakan bahwa :

⁸ Wawancara dengan Bapak Asep (P¹) selaku Kasie Rehabilitasi Sosial, 25 september 2012, di kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

" khusus daerah merak mbak, ya daerah sekitar sini aja. ga da orang cilegon, kan merak mah daerah perantauan, jadi ada dari jawa, sunda, lampung yang lama tinggal di merak aja".⁹

Diketahui bahwa yang dibina adalah orang – orang yang hanya tinggal di daerah sekitar Merak dan itu pun dari berbagai macam daerah seperti: Lampung, Jawa, Sunda, dan lain - lain. Mereka bukan asli Orang Cilegon, melainkan orang yang sudah beberapa lama tinggal di Merak. Selain itu juga peneliti masih penasaran dengan pernyataan yang diberikan, peneliti pun melanjutkan perbincangan dengan Mbak Pujiyanti dan Mbak Evi, selaku peserta pembinaan yang mengungkapkan bahwa :

Mbak Pujiyanti : " oh,, maaf, saya bukan wanita malam. Saya Cuma Pembantu Rumah Tangga disini. Jadi supaya ada kegiatan lagi. Kalo anak – anak belum pada datang jadi saya bisa ngerjain salon."¹⁰

Mbak Evi : "awalnya saya tidak tau ada pembinaan, saya ditawarkan sama mbak "R", jadi kan kita tidak tau jadi tau. Ada pendaftaran jadi saya ikut aja. Tadinya saya kerja di asuransi CIN yang dekat Sate Cilegon."¹¹

Dari pernyataan di atas peneliti terkejut dengan ungkapan yang terlontar. Bahwa kenyataannya peserta yang dibina bukan berasal dari kalangan Pekerja Seks Komersial. Melainkan dari Pembantu Rumah Tangga dan Ibu Rumah Tangga. Tidak Cuma itu, terlontar juga ungkapan dari Mbak "R" yang merupakan germo / mami yang mengumpulkan

⁹ Wawancara dengan Mbak Pujiyanti (F¹), salah satu peserta pembinaan Dinas Sosial Kota Cilegon, 03 oktober 2012 di Salon "R" pada pukul 15.00.

¹⁰ Wawancara dengan Mbak Pujiyanti (F¹), salah satu peserta pembinaan Dinas Sosial Kota Cilegon, 03 oktober 2012 di Salon "R" pada pukul 15.00.

¹¹ Wawancara dengan Mbak Evi (F⁵), salah satu peserta pembinaan Dinas Sosial Kota Cilegon, 03 oktober 2012 di Salon "R" pada pukul 15.00.

peserta pembinaan, menawarkan diri untuk mencari peserta pembinaan lagi yang berasal dari anak Pak RT yang masih sekolah. Peneliti terus berusaha mendapatkan informasi tentang para peserta yang mengikuti pembinaan Dinas Sosial, namun nyatanya bahwa tidak hanya Pembantu Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga dan Anak Sekolah saja yang mengikuti, melainkan Ibu Hamil dan Anaknya pun juga mengikuti pembinaan ini. Selain itu juga pembinaan tataboga yang di ikuti oleh 25 orang juga tidak merupakan PSK melainkan dari ibu – ibu kader dari posyandu. Sehingga peneliti mengajukan pertanyaan kembali kepada mbak pujiyanti yang mengungkapkan bahwa :

" pertama saya ditawarkan sama mbak "R", diambil anak – anak sini 25 orang, trus diambil dari orang terminal. pas itu saya diajukan untuk ikutan gitu. Ya saya mau kan, sapa tau ajah ikut – ikut bisa. jadi saya kan diajukan, trus saya tanya sama mbak "R", mbak "R" ini kan buat anak – anak sini tak gituin orang – orang di terminal, jual – jual kopi apa, trus kata mbak "R" ga papa ikut nanti diajuin."

Sedangkan peneliti menanyakan hal yang sama juga kepada mbak Aning yang mengikuti pembinaan Tataboga yang mengungkapkan :

" ya itu apa, kalo kita udah bisa bikin kue, kan lumayan, kita bisa ngembangkan bisa usaha, kalo ada dikantor mana gitu yang lagi rapat kan kita kalo kuenya enak bisa dipesen gitu. Cuma kadang – kadang dari pusatnya ngasih informasinya mendadak gitu, saya langsung suruh ke kantor. Katanya mbak ning saya ada program, tolong sih minta 10 orang buat pelatihan tataboga. Saya kan nyari – nyari, ya udah yang ada ajah lah jadi kader –kader posyandu yang saya ajak 10 orang. "

Dari ungkapan di atas jelas diketahui bahwa mbak pujiyati dan mbak Aning jelas – jelas mengetahui bahwa pembinaan tersebut untuk Pekerja Seks Komersial, tetapi berhubung dari germo / maminya yang mengajak dan mengiming – imingi peserta agar ikut serta dalam pembinaan. Jadi Kesimpulannya bahwa Peranan Dinas Sosial dalam membina Pekerja Seks Komersial tidak dilakukan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya didapat oleh PSK dari Dinas Sosial, ternyata tidak didapat, dikarenakan peserta pembinaan berasal dari orang – orang yang dipilih dan diajak oleh kalangan – kalangan tertentu yang di minta oleh Dinas Sosial untuk mengumpulkan sedikitnya 10 sampai 25 orang untuk mengikuti pembinaan tersebut. Dinas Sosial selalu mengambil jalan pintas untuk mengumpulkan peserta pembinaan. Dengan Germo/Mami dan masing – masing Link yang ada di berbagai daerah yang selalu diandalkan Dinas Sosial untuk mengumpulkan peserta pembinaan, tanpa mau menanyakan apakah peserta yang dikumpulkan sesuai dengan syarat dilakukan pembinaan. Sehingga program – program pembinaan PSK yang berjalan setiap tahunnya ternyata tidak tepat pada sasaran, terlebih untuk pembinaan salon dan tataboga. Dalam hal ini Kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembinaan itu hanya sekedar program yang berjalan tanpa memandang sasaran yang dituju.

Setelah dilakukan pembinaan, Dinas Sosial mengadakan Bimbingan Lanjut (Binjut) atau magang dengan nara sumber atau pelatuhnya, Bagaimana memotong rambut dengan bagus? Sehingga setelah

magang PSK tersebut dapat pada tingkat mahir, agar bisa mandiri dan profesional dalam melakukan usahanya. Setiap usaha yang dilakukan terbagi dalam 25 orang setiap salon minimal membentuk 5 kelompok. Setelah PSK itu mahir, usaha mereka masih dalam pengawasan Dinas Sosial. Dinas Sosial selalu memonitoring usaha yang dilakukan oleh PSK tersebut. Misalnya dalam usaha salon, Dinas Sosial memonitoring usaha tersebut dengan mendatangi tempat usahanya dan melihat peralatan yang diberikan dipakai atau tidak, jika usahanya berjalan dengan bagus, maka Dinas Sosial akan memberikan modal dan memberikan peralatan yang secukupnya kepada PSK tersebut. Biasanya yang melakukan kegiatan atau usaha seperti ini kebanyakan dari wanita yang sudah berumur ±35 tahun yang kemungkinan tidak akan kembali lagi ke profesinya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Asep, bahwa :

*"... di monitoring, di evaluasi, kemaren yang telah dilakukan pembinaan berjalan atau tidak, kalau tidak berjalan sebabnya apa? kendalanya apa ? kalau berjalan nanti diusulkan ke provinsi untuk minta tambahan modal. Itu namanya binjut (bimbingan lanjut)."*¹²

Beda yang diungkapkan oleh Mbak Pujiyanti yang mengikuti Pembinaan mengungkapkan, bahwa :

*"setelah dibina ya udah mbak, gak ada pengawasan dari Dinas Sosial, tapi ga tau kalo komunikasi dengan mbak R."*¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Asep (P²) selaku Kasie Rehabilitasi Sosial, 25 september 2012, di kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

¹³ Wawancara dengan Mbak Pujiyanti (P⁴), salah satu peserta pembinaan Dinas Sosial Kota Cilegon, 03 oktober 2012 di Salon "R" pada pukul 15.00.

Ternyata selama ini Dinas Sosial tidak melakukan pengawasan langsung terhadap PSK yang dibinanya, melainkan Dinas Sosial hanya memantau peserta pembinaannya dari Germo/maminya, Padahal, seharusnya Dinas Sosial lebih berperan dalam melakukan pengawasan atau Bimbingan lanjut terhadap PSK yang dibina. Dinas Sosial hanya memberikan pembinaan dan setelah itu Dinas Sosial cuma berkomunikasi dengan Germo / Mami saja untuk mengetahui perkembangan PSK setelah dibina. Tanpa melakukan pendekatan yang persuasif terhadap PSK yang dibina. Untuk permasalahan PSK, Bapak Asep selaku Kasie Rehabilitasi Sosial mengungkapkan bahwa :

"tujuannya semua sudah tercapai, tinggal memang hasilnya tinggal menunggu, karena memang hasilnya ga bisa sekali jadi, kalau dinas sosial mah, kecuali kalau fisik bangun jalan hari ini bikin hari ini bisa di lihat, kalau sosial hari ini ada pembinaan maka tahun depan atau dua tahun yang akan datang baru bisa dilihat berhasil atau tidak berhasilnya."¹⁴

Tujuan Dinas Sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan merubah pola pikir dan gaya hidup agar kedepannya jauh lebih baik lagi sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, namun kenyataanya bahwa hasil dari tujuan tersebut tidaklah dapat langsung dirasakan, melainkan butuh proses tertentu untuk merasakannya. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak R yang mempunyai Salon R di Merak mengungkapkan bahwa :

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Asep (P) selaku Kasie Rehabilitasi Sosial, 25 september 2012, di kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

"Cuman yang berkembang cuma 1, karena emang susah sih orang yang kaya gitu mah, walaupun kita bina. Kalo emang dia kerjanya kayak gitu".¹⁵

Dari penjelasan dan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Dinas Sosial dalam mencapai tujuannya tidak maksimal. Dikarenakan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial hanya mencakup di daerah Merak saja, sedangkan Kota Cilegon memiliki 8 kecamatan yakni: Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Grogol, Purwakarta, Jombang dan Citangkil, yang mana banyak terdapat PSK didalamnya. Dikarenakan banyaknya PSK yang berkeliaran di Kota Cilegon yang bukan asli penduduk Kota Cilegon.

Bukan hanya itu saja, Peneliti pun menemui hal baru dalam Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni: peserta yang mengikuti Pembinaan bukan berasal dari kalangan PSK, melainkan dari berbagai kalangan. PSK yang mengikuti pembinaan tersebut hanya ada beberapa saja. Hal ini lah yang menyebabkan PSK yang dibina tidak dapat berkembang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pun hanya dengan berkomunikasi dengan Germo/Maminya saja, tanpa melakukan pendekatan terhadap PSK yang dibinanya.

4.3.2 Standar Dinas Sosial

Program – Program yang dimiliki Dinas Sosial dalam pembinaan meliputi: Pembinaan Salon dan Pembinaan Tataboga. Dalam melakukan

¹⁵ Wawancara dengan Mbak "R" (I⁶), Pemilik Salon "R" yang digunakan untuk pelatihan salon oleh Dinas Sosial, 02 oktober 2012, pada pukul 20.00.

program – program Dinas Sosial memiliki tahap – tahapannya, yaitu tahap pertama, persiapan menyangkut peserta, (ATK, jumlah peserta) Tahap kedua, pelaksanaan pembinaan (tempat, waktu, tanggal, dan lain-lain) serta tahap ketiga pelaporan dari hasil pembinaan (kegiatannya berjalan atau tidak, kendalanya apa saja, pertanggungjawabannya). Dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 4.3 Tahap Program Pembinaan



(Sumber : Dinas Sosial Kota Cilegon 2012)

Program – program Dinas Sosial sudah terorganisasi dan terintegrasi baik dengan peserta di lapangan ataupun dengan instruktur atau dengan pihak Dinas Sosial dan semua yang terkait. Hal ini dikatakan oleh Bapak Sudaryo :

" semua program dan tupoksi sudah dilakukan dalam masing – masing bidang, walaupun target sasaran belum mencapai 100%, dikarenakan anggaran yang minim ".¹⁶

Dari pernyataan di atas, Dinas Sosial mendapatkan anggaran yang sangat minim untuk Pembinaan dan Sosialisasi, Anggaran yang diberikan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sudaryo (P) selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 03 Juli 2012, di Kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

Pemerintah kepada Dinas Sosial sebesar 80 juta per tahun. Sedangkan, Dinas Sosial memiliki 22 PMKS dalam setiap bidangnya, dari 22 PMKS hanya bidang – bidang tertentu yang dapat melaksanakan tugas dan program yang ada. Oleh karena itu Dinas Sosial selalu melakukan secara bertahap dalam menentaskan PMKS di Kota Cilegon dalam 1 tahun.

Penyakit HIV/AIDS di Kota Cilegon semakin meningkat dari tahun ke tahun. PSK yang memiliki penyakit seperti HIV/AIDS akan diserahkan Dinas Sosial kepada Dinas Kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut dan dibina. Pekerja Seks Komersial dari tahun 2009 yang terkena penyakit HIV/AIDS mencapai 36 orang dan sekarang tahun 2012 meningkat tajam hingga mencapai 240 orang. Keterangan tersebut didapat dari Bapak Sudaryo selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa :

” kalo HIV/AIDS kita baru ada tingkat sosialisasi kalo pembinaan Dinas Kesehatan. Itu sebenarnya meningkat tajam Tahun 2009 36 orang, sekarang sudah mencapai 240 orang. Namanya nakal yang biasanya nularin itu laki – laki yang susah ditangkap, tapi sekatrang alhamdllilah sudah 40% tertangkap laki – lakinya.”¹⁷

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa PSK setiap Tahunnya 80 Orang yang terkena penyakit HIV/AIDS di Kota Cilegon. Penyakit HIV/AIDS tidak hanya ditularkan oleh wanita saja, namun melainkan dapat ditularkan oleh para kaum laki – laki yang menderita penyakit HIV/AIDS juga, dimana kaum laki – laki inilah yang susah untuk

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sudaryo (P) selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 03 Juli 2012, di Kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

ditangkap dan diperiksa. Dengan semakin meningkatnya penyakit HIV/AIDS, Dinas Sosial selalu mengadakan sosialisasi terhadap para PSK. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Tri, salah satu Staff Dinas Kesehatan daerah Merak, menyatakan bahwa :

" Iya, biasanya kan Dia ada Program – Programnya ni, Pokoknya kalo seumpamanya ada yang mesti dibina itu masuknya ke Dinas Sosial, tapi kalo kerjasama dalam tindakan dia mah ga, jarang. Ada kaitan Cuma jarang. Umpanya ada razia dari Satpol PP itu langsung masuk ke Dinsos, kalo DinKes itu pembinaan Kesehatan aja. Pas pemeriksaan itu ke DinKes sesudah diperiksa baru dikasih ke Dinsos, kita selalu gandengan dengan KPA (Komunitas Penyuluhan AIDS/HIV). ”¹⁸

Jadi peranan Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan hanya sekedar untuk pemeriksaan penyakit HIV / AIDS. Setelah diadakan pemeriksaan hasilnya diberikan ke Dinas Sosial, untuk Sosialisasi dan Program Pembinaan kesehatan itu sendiri hanya diberikan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Sosial memfasilitasi PSK dengan mengadakan test darah terhadap PSK yang terjaring oleh Satpol PP. Dinas Kesehatan mempunyai wadah bagi PSK yang terkena atau tejangkit HIV/AIDS yang bernama KPA (Komunitas Penanggulangan AIDS) yang mana Dinas Kesehatan akan selalu memantau perkembangan PSK dan akan selalu diberikan Konseling atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap PSK tersebut. Dan kenyataannya bahwa PSK hanya mengenal Dinas Kesehatan, dan tidak mengenal Dinas Sosial. Menurut Mami R, yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Dinasty, mengungkapkan bahwa :

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Tri (T¹), Staf Dinas Kesehatan, 04 Oktober 2012 pada pukul 21.00

*" ada dari Dinas Kesehatan, diperhatikan oleh Dinas Kesehatan takut ada terkena HIV/ AIDS, berbentuk perkumpulan dari semua para mami dari semua tempat hiburan untuk prosedur tentang kesehatan. Kalo Dinas Sosial itu ada lagi manager bukan mami. Yang diwawancara itu manager saya bukan saya. "*¹⁹

Kenyataannya keberadaan dan kinerja Dinas Sosial belum dapat dikenal dan dirasakan oleh PSK di tempat – tempat hiburan. PSK di tempat hiburan hanya mendapatkan perhatian dan mengenal Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap PSK di tempat hiburan tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS dan tentang penggunaan Kondom yang aman dipakai. Lain hal dengan Dinas Sosial yang hanya menunggu hasil razia Satpol PP dan mengirim PSK tersebut ke Tempat Rehabilitasi di Pasar Rebo atau Pasar Ona Rangkasbitung. Dinas Sosial tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap PSK yang berada di tempat hiburan maupun di jalanan. Sehingga PSK yang ada di tempat hiburan tidak mengenal dengan adanya Dinas Sosial. Padahal yang sangat berperan dalam mengatasi dan menangani PSK adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial akan bergerak melakukan razia ketempat hiburan apabila kegiatan tersebut di naungi oleh POLRES yang mana merupakan kegiatan gabungan untuk menertibkan PSK.

¹⁹ Wawancara dengan Mami "R" (T^h), seorang mami atau pemandu lagu di tempat hiburan "D", 26 September 2012 pada pukul 12.00.



GAMBAR 4.4 Pemeriksaan Dinas Kesehatan

Dinas Sosial tidak memakai prosedur dalam melakukan pembinaan karena Dinas Sosial memakai sistem pendekatan langsung terhadap PSK nya. Dinas Sosial datang langsung kepada koordinator PSK di lapangan, seperti mami untuk mengumpulkan PSK sejumlah yang diminta oleh Dinas Sosial, yang kemudian akan dibina di Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki Germo atau Mami – mami tertentu dalam setiap melakukan pembinaan.

Pembinaan dilakukan di Dinas Sosial Kota Cilegon, selama 10 hari untuk Salon sedangkan Tataboga 5 hari. PSK yang dibina tidak diberikan tempat penginapan melainkan pulang pergi saja dan mendapat uang transport sebesar Rp 50.000 per orang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Staff Rehabilitasi Sosial, Ibu Eha mengatakan bahwa :

*"Pembinaan itu tergantung, kalo pembinaan saja sehari juga kelar. Tapi kalo mengadakan pelatihannya itu sampai minimal 10 hari atau seminggu."*²⁰

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Mbak Evi salah satu Ibu Rumah Tangga yang mengikuti pembinaan, mengungkapkan bahwa :

*" kemaren disini 5 hari pulang pergi, dikasih uang transport Rp. 50.000 per orang. Jam 08.00 udah ngumpul sampe jam 16.00."*²¹

Kenyataannya bahwa pembinaan yang dirasakan oleh peserta yang dibina hanya 5 hari dan bukan 10 hari seperti yang di ungkapakan oleh Ibu Eha. Hal ini merupakan kecurangan waktu Dinas Sosial dalam memberikan pelatihan terhadap peserta, yang seharusnya pelatihan diberikan dalam 10 hari atau seminggu, tetapi Dinas Sosial hanya memberikan 5 hari dalam pelatihan. Masalah ini bisa saja menimbulkan kecurangan lainnya, seperti kecurangan dana. Dana yang seharusnya untuk pembinaan dalam jangka waktu 10 hari, di minimalisir menjadi 5 hari. Hal ini bisa saja menimbulkan korupsi dalam menyertakan anggaran kepada pemerintah. Selain itu, peserta pembinaan diberikan uang transpot sebesar Rp. 50.000 per orang. Setiap harinya mereka berkumpul di Salon Rina dari jam 08.00 sampai dengan 16.00 dan itu dilakukan secara terus menerus selama 5 hari.

Kesimpulannya bahwa dalam standar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk pembinaan melalui 3 (tiga) tahap, diantaranya: tahap

²⁰ Wawancara dengan Ibu Eha Nursoleha (F) sebagai staf Rehabilitasi Sosial, 27 september 2012, di Kantor Dinas Sosial, pada pukul 11.00

²¹ Wawancara dengan Mbak Evi (F), salah satu peserta pembinaan Dinas Sosial Kota Cilegon, 03 oktober 2012 di Salon "R" pada pukul 15.00.

Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Dari ketiga tahap tersebut Dinas Sosial menggunakan Germo/Mami untuk mengumpulkan para peserta sebanyak 25 orang dan standar waktu yang di gunakan oleh Dinas Sosial untuk Pembinaan dan Pelatihan Salon adalah 10 hari. Namun, kenyataan yang ditemukan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dinas Sosial melaksanakan Program Pembinaan dan Pelatihan kurang dari 10 hari, yaitu 5 hari. Dan penggantian Uang transport yang diberikan Dinas Sosial Rp 50.000 per orang. Semakin meningkatnya penyakit HIV/AIDS di Kota Cilegon menandakan bahwa lemahnya Dinas Sosial dalam mengawasi dan mengantisipasi PSK Kota Cilegon.

4.3.3 Alat atau Sarana

Dalam menangani PSK Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. PSK yang terjaring oleh Satpol PP kemudian diberikan kepada Dinas Sosial untuk didata dan ditindak lanjuti. Biasanya PSK yang diserahkan oleh pihak Satpol PP kepada Dinas Sosial adalah PSK yang nakal atau sudah berulang kali tertangkap oleh Satpol PP dan PSK yang sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan yang tidak memiliki penyakit. Menurut Ibu Eha, beliau Staf Rehabilitasi mengungkapkan bahwa :

" 1 kali PSK tertangkap akan dilepas dan diarahkan, 2 kali akan diberikan dispensasi, 3 kali maka PSK akan dibawa dan dibina di Pasar Rebo selama 6 bulan."²²

Tidak semua yang ditangkap oleh Satpol PP adalah Pekerja Seks Komersial (PSK), hal ini diketahui setelah hasil pemeriksaan dari Dinas Sosial. Jika PSK tersebut baru tertangkap akan dilepaskan dan hanya diberikan arahan saja oleh Dinas Sosial, tetapi jika PSK tersebut tertangkap untuk yang kedua kalinya maka PSK tersebut akan dibuatkan surat pernyataan yang mana PSK tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan diberikan Dispensasi oleh Dinas Sosial, Namun jika PSK tersebut sudah tertangkap untuk yang ketiga kalinya, maka Dinas Sosial tidak akan lagi membiarkan atau melepaskan PSK tersebut dan akan dibawa langsung ketempat pembinaan di Pasar Rebo, Jakarta.



GAMBAR 4.5 Penangkapan PSK oleh SATPOL PP

Pemerintah sudah menyediakan sarana untuk para PSK yakni Pembinaan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Pembinaan dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali. Hal ini dikarenakan

²² Wawancara dengan Ibu Eha Nursoleha (F³) sebagai staf Rehabilitasi Sosial, 27 september 2012, di Kantor Dinas Sosial, pada pukul 11.00

anggaran yang minim. Dalam jangka setahun sekali Dinas Sosial selalu mengupayakan untuk perubahan bagi PSK. Menurut Bapak Asep selaku Kasie Rehabilitasi Sosial mengungkapkan bahwa :

” jadi yang diupayakan oleh Dinas Sosial itu keinginan utama dari 25 orang itu 100% semua berubah. tapi kan tergantung mentalnya de, karena memang servisnya gampang kalo sudah melakukan itu, tinggal ngangkang saja bisa mendapatkan lebih dari usaha salon. Tapi semua kembali kepada orang dan mentalnya mau kembali apa enggak. Pemerintah lewat Dinas Sosial sudah berusaha untuk menyediakan sarana y diadakan pelatihan dan pembinaan.”²³

Pelatihan Salon yang diberikan Dinas Sosial kepada PSK merupakan wujud sarana yang disediakan untuk tumbuh dan berkembangnya PSK dalam mengasah kemampuan di bidang Salon. Namun kenyataannya, tidak mudah untuk membuat PSK berubah dan kembali ke jalan yang benar. Dari sekian banyak PSK yang dibina hanya ada beberapa PSK saja yang mau berkembang dan membuka usaha salon. PSK yang lainnya masih saja menjajakan tubuhnya. Menurut pendapat Mami Uni yang memiliki Cafe di bawah Kolong Jembatan MangkuPutra juga mengungkapkan bahwa :

” tapi yang namanya anak malam, Pemerintah bisanya menganjurkan tapi tidak bisa melihat pola kehidupan, menganjurkan mereka harus usaha, sedangkan beban mereka itu apa, tuntutan kehidupan mereka itu apa? Dinsos hanya memberikan alat ala kadarnya.”²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Asep (F) selaku Kasie Rehabilitasi Sosial, 25 september 2012, di kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

²⁴ Wawancara dengan Mami Uni (I), pemilik warung remang-remang di bawah Jembatan jalan tol Cilegon depan Hotel Mangku Putra, 25 september 2012, pada pukul 19.00.

Kenyataannya memang bahwa pemerintah hanya memikirkan untuk merubah pola pikir PSK, tetapi tidak memikirkan pola kehidupan PSK tersebut, yang mana kebanyakan dari PSK berasal dari perekonomian rendah. Dengan membuka Salon, untung yang mereka dapat tidak sebanding dengan untung yang didapat dari menjajakan tubuhnya kepada para kaum adam. Sedangkan mereka harus membiayai dan meghidupi keluarganya. Dari pernyataan mami di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Sosial dalam menangani PSK dengan memberikan pembinaan dan pelatihan salon hanya bersifat sementara, yang mana Dinas Sosial hanya memberikan alat dan pelatihan sekedarnya tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh PSK tersebut.

Selain itu, Mbak Pujiyanti, Pembantu rumah tangga yang ikut dibina oleh Dinas Sosial mengungkapkan bahwa :

*" dikasih hairdroyer, catokan, gunting, ya alat – alat salon lah. Dipake, Ya kalo digunung sekiranya ada yang mau creambath apa gitu. Kalo saya buka di sana ga da deh, adanya juga di sini. Orang saya kan sering disini, jadi saya ibaratnya disini dipake alatny."*²⁵

Diberikannya seperangkat alat salon seperti, gunting, hairdroyer, catokan dan lain – lain, untuk dipakai dan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Namun kenyataannya bahwa alat – alat salon yang diberikan tidak dipakai dengan sebaik mungkin. Bahkan alat – alat tersebut diserahkan atau diberikan kepada salon "R" untuk dipergunakan di salon tersebut. Hal ini sangat miris sekali. Karena alat yang diberikan oleh Dinas

²⁵ Wawancara dengan Mbak Pujiyanti (P⁴), salah satu peserta pembinaan Dinas Sosial Kota Cilegon, 03 oktober 2012 di Salon "R" pada pukul 15.00.

Sosial yang seharusnya dipakai dan dipergunakan sebagai mestinya oleh PSK yang dibina, malah dipakai atau digunakan oleh pemilik Salon "R" yang mempunyai tempat untuk pembinaan salon, dimana pemilik salon merupakan Germo/Mami yang menyediakan peserta untuk dibina. Sedangkan mbak aning peserta peminana tataboga mengungkapkan bahwa:

" bikin kue kemaren, akhirnya kan dikasih perabot itu, kompor gas, trus plakat yang buat ngukus bolu, mixer, oven ada 8 (delapan) paket satu orang. Kepake ajah. "

Dari ungkapan mbak aning tersebut, diketahui bahwa peralatan yang diberikan oleh Dinas Sosial dipakai untuk sehari – hari. Peralatan tersebut tidak dijual seperti peserta pembinaan salon. Dikarenakan peralatan tersebut merupakan peralatan yang memang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Lain hal menurut pendapat dari Mbak Borju, beliau adalah salah seorang mantan PSK yang dibina di Pasar Rebo mengatakan bahwa :

*" dulu pernah kerazia dan dikirim kepasar rebo, disana diberikan pendidikan, olahraga, pengajian dan kasih kegiatan kayak tataboga, saya cuma tiga bulan disana karena katanya kelakuan saya baik. Trus dikasih kompor, prabotan rumah tangga kaya piring, gelas, kenceng, kalo alat – alat tataboga mah ga dikasih. "*²⁶

Pembinaan di Pasar Rebo hanya memberikan pelatihan dan kegiatan yang sewajarnya, seperti olahraga, pengajian dan diberikan pendidikan. Selain itu juga, para PSK yang dibina di Pasar rebo diberikan pelatihan untuk menggali bakat dan kemampuan mereka, seperti pelatihan

²⁶ Wawancara dengan Mbak Borju (I⁰), mantan PSK, 26 September 2012, pada pukul 15,00

tataboga, salon, menjahit. Namun disayangkan bahwa setelah mereka keluar dari pembinaan di Pasar Rebo, mereka tidak diberikan peralatan atau perlengkapan kegiatan tataboga tersebut, mereka hanya dibekali pengetahuan tataboga saja tanpa menindaklanjuti kegiatan tersebut setelah keluar dari tempat rehabilitasi, sehingga banyak sebagian dari PSK yang kembali ke profesinya semula.

Kesimpulannya bahwa sarana yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah dilaksanakan dengan baik dan Alat – alat yang di berikan juga sudah sesuai dengan pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Tetapi apakah pelatihan tersebut dapat mengubah pola pikir PSK untuk beralih profesi?? Jelas sekali dari ungkapan diatas, bahwa sarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam membina PSK belum dapat berjalan dengan baik. Masih banyaknya PSK di Kota Cilegon menandakan bahwa peranan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan masih kurang efektif. Alat – Alat yang di berikan tidak di gunakan dengan sebaik mungkin, bahkan alat – alat tersebut diberikan kepada Salon tempat pembinaan Dinas Sosial.



GAMBAR 4.6 Pelatihan Salon

4.3.4 Kompetensi Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki 38 Pegawai, dalam Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial memiliki 1 Kabid, 1 Kasie Rehabilitasi Sosial, 1 Kasie Pelayanan Sosial, 2 Staff Rehabilitasi Sosial dan 4 Staff Pelayanan Sosial. Dari keseluruhan bidang hanya ada satu orang saja yang berasal dari lulusan Sosial, lainnya kebanyakan berasal dari lulusan Ekonomi, Manajemen, Hukum dan Komputer. Menurut pendapat Bapak Sudaryo mengungkapkan bahwa :

*” kompetensi latar belakang pendidikan ga terlalu dipermasalahkan. Yang penting TUPOKSi dilaksanakan dengan baik. Dan setiap kegiatan itu ada indikator keberhasilannya”.*²⁷

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial tidak mempermasalahkan latar belakang pendidikan yang di miliki oleh masing – masing pegawai. Asalkan pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sudaryo (P) selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 14 April 2011, di Kantor Dinas Sosial pada pukul 10.00.

dengan baik dan berhasil mencapai target. Dinas Sosial mempunyai indikator – indikator keberhasilan tertentu dalam setiap bidang. Jika TUPOKSI tidak dapat dicapai dengan baik, maka Kepala Bidang berhak untuk memanggil Kepala Seksinya untuk mengetahui kendala apa yang menghambat tugasnya dan diberikan pengarahan, namun jika untuk kedua kalinya TUPOKSI tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan di berikan surat peringatan dan untuk kegagalan yang ketiga kalinya, maka pegawai tersebut akan di mutasi ke daerah terpencil.

4.3.5 Motif Dinas Sosial dan PSK

Pembahasan selanjutnya, peneliti akan membahas tentang Motif. Peneliti akan membagi dua Motif dalam menangani Pekerja Seks Komersial, diantaranya ada Motif Pegawai Dinas Sosial dan Motif PSK, pembahasannya akan dibahas lebih rinci dibawah ini:

a. Motif Dinas Sosial

Dinas Sosial selalu mempunyai motifasi dalam menangani PSK di Kota Cilegon, salah satunya adalah motif untuk meminimalisir PSK di Kota Cilegon dan supaya target sasaran Dinas Sosial Kota Cilegon dapat tercapai 25 orang per tahunnya, sehingga dalam satu periode dapat mencapai 100%. dengan secara pendekatan PSK. Hal ini dilakukan supaya image Kota Cilegon tidak buruk dengan adanya PSK. Namun kenyataannya, Kinerja Dinas Sosial dalam menangani PSK belum dapat dilakukan dengan maksimal, keberadaan Pekerja Seks Komersial sangat sulit untuk

dihilangkan dan diminimalisir keberadaannya, karena PSK tersebut bukan saja berasal dari daerah Kota Cilegon, melainkan berasal dari luar Kota Cilegon yang datang ke Cilegon dengan berbagai alasan diantaranya ada yang mencari kerja, ikut saudara, mencari suami, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang dicari oleh para perantau pun tidak didapat oleh mereka, dan akhirnya mereka mengambil keputusan dengan bekerja sebagai wanita seks komersial. Sehingga ini menambah daftar PSK yang ada di Kota Cilegon. Oleh karena itu, PSK Kota Cilegon semakin meningkat tiap tahunnya dan semakin membuat image Kota Cilegon menjadi buruk.

b. Motif Pekerja Seks Komersial

Permasalahan Pekerja Seks Komersial yang kini sedang terjadi di Kota Cilegon kenyataannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terlihat di sepanjang jalan Kota Cilegon yang nampak bahwa banyaknya para PSK yang menjajakan tubuhnya dengan lincah kepada para lelaki dan di berbagai tempat hiburan seperti tempat – tempat karaoke, cafe, bahkan di tempat bilyard. Hal ini dipicu karena Kota Cilegon merupakan Kota Industri dimana banyak kalangan – kalangan atas mencari hiburan demi memuaskan nafsu birahinya dan menghilangkan penatnya semata. Selain itu juga Kota Cilegon merupakan perbatasan atau penyebrangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang mana hal ini juga dapat mendatangkan PSK dari berbagai kota. Tidak semua PSK berasal dari Kota Cilegon, mereka berasal dari berbagai daerah yang datang ke Cilegon untuk mencari kerja.

Berbagai alasan yang diungkapkan oleh para PSK dalam menekuni pekerjaannya, seperti Mbak Kity, PSK yang sering mangkal di Regent, mengungkapkan bahwa :

*" awalnya saya datang ke Cilegon untuk mencari kerja, tapi karena saya ga punya ijazah SMA, saya terpaksa kerja kaya gini. Orangtua saya taunya saya kerja disini sebagai SPG. "*²⁸

Sama hal yang di ungkapkan oleh seorang PSK Simpang Mbak Santi, mengatakan bahwa :

*" waktu itu saya kan mau cari kerja dari toko ke toko, pas ditoko baju ada mbak- mbak yang nawarin kerjaan, katanya mau ga jaga warung saya. Ya karena saya ga tau kan, ga taunya diwarung itu ada jualan minumannya juga, trus besoknya saya disuruh nemenin dan ngelayanin tamu gitu. "*²⁹

Dari wawancara di atas jelas sekali disimpulkan bahwa kehadiran PSK di Kota Cilegon disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat sulit dan oleh keadaan yang mengharuskan mereka menjadi seorang Pekerja Seks Komersil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di Cilegon. Menurut Bapak Sudaryo, mengatakan bahwa:

*" meningkatnya Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon di karenakan adanya pembeli, masih adanya oknum jasa warung remang – remang, Kota Transit dan latar belakang yang suram. "*³⁰

Jadi akar permasalahan dari Pekerja Seks Komersial adalah keadaan ekonomi yang menuntut mereka untuk bekerja seperti itu, oknum –

²⁸ Wawancara dengan Mbak Kity (I¹), seorang PSK yang bekerja di Regent, 23 September 2012, pada pukul 01.30.

²⁹ Wawancara dengan Mbak Santi (I²), seorang PSK yang mangkal di Simpang, 03 Oktober 2012, pada 17.00.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sudaryo (I¹) selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 14 April 2011, di Kantor Dinas Sosial pada pukul 10.00.

oknum yang selalu menyediakan jasa remang – remang di warungnya merupakan fasilitas yang didukung untuk melakukan hubungan badan dan tempat mangkal PSK untuk mendapatkan pelanggan. Selain itu juga masih banyaknya para pembeli atau pengguna jasa PSK yang berkeliaran di jalan. Keberadaan pelanggan PSK pun sangat berpengaruh besar terhadap praktek prostitusi yang berada di Kota Cilegon. Hal ini diungkapkan oleh Mbak Kity seorang PSK di Regent bahwa :

" saya punya 6 (enam) pelanggan tetap, yang suka datang ke Regent dan memboking saya."³¹

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PSK tidak akan pernah mau berubah selama masih adanya para kaum Adam yang memiliki banyak uang untuk menafkahi mereka diluar sana. Hal ini juga mengakibatkan pertumbuhan PSK di Kota Cilegon semakin meningkat. Selain itu juga, lemahnya PSK yang mempunyai pelanggan tetap ini bisa dibilang sebagai simpanan para laki – laki, yang mana laki – laki itu harus dapat memenuhi setiap kebutuhan PSK tersebut dan PSK ini pun menggantungkan hidupnya kepada Pelanggannya.

4.3.6 Peluang Dinas Sosial dan PSK

Keberadaan Praktek Prostitusi yang sangat sulit untuk dihilangkan, menjadi pekerjaan yang harus dicari jalan keluarnya. Dinas Sosial tidak hanya diam saja dalam menangani PSK tersebut. Dalam hal ini peneliti

³¹ Wawancara dengan Mbak Kity (I¹), seorang PSK yang bekerja di Regent, 23 September 2012, pada pukul 01.30.

melihat peluang yang ada di Dinas Sosial dalam menangani Pekerja Seks Komersial dan peluang yang diberikan kepada Pekerja Seks Komersial. Diantaranya :

a. Peluang Dinas Sosial

Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial Dinas Sosial sangat berpeluang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan berjalannya program pembinaan yang mencapai 25 orang PSK setiap tahunnya dalam 5 tahun masa kerja yang ditentukan, maka peluang yang didapat oleh Dinas Sosial adalah naik Jabatan. Tetapi, demi tercapainya peluang tersebut Dinas Sosial selalu memakai jalan singkat untuk menjalankan programnya, yakni dengan melaksanakan program pembinaan PSK dengan bantuan dari germo/ mami dan orang – orang yang menjadi kepercayaan Dinas Sosial untuk mengumpulkan peserta pembinaan sejumlah 25 orang. Hal ini menandakan bahwa kinerja Dinas Sosial sangat buruk. Dikarenakan pembinaan yang diperuntukkan untuk PSK tidak didapat. Sehingga tidak ada peluang bagi PSK untuk membuka usaha.

b. Peluang Pekerja Seks Komersial

Dinas Sosial sudah berusaha untuk membina dan melatih PSK untuk dapat memiliki kemampuan dan mengubah pola pikir Pekerja Seks Komersial. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asep, beliau memaparkan bahwa :

*"peluang kerja yang mereka dapat itu mereka dapat membuka usaha salon."*³²

Namun faktanya, tidak ada peluang yang didapat oleh Pekerja Seks Komersial. Dikarenakan saran, keterampilan, pengetahuan dan peralatan yang seharusnya didapat PSK, melainkan tidak didapat oleh PSK. Adapun pembinaan dilakukan kepada orang – orang yang diajak atau dipilih oleh orang – orang kepercayaan Dinas Sosial.

4.3.7 Umpan Balik Masyarakat, PSK dan Mantan PSK

Dalam Pembahasan ini peneliti membagi menjadi 2 kelompok Umpan Balik yang dirasakan oleh Masyarakat, PSK dan Mantan PSK. Penjelasan akan dibahas dibawah ini :

a. Masyarakat

Jika melihat fakta – fakta yang terjadi pada saat ini, Dalam menyelesaikan program kerja, Dinas Sosial sudah memberikan pembinaan terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon. Namun masih banyaknya PSK yang berkeliaran di Kota Cilegon, membuat peneliti melakukan penelitian di daerah merak yang mana banyak sekali pekerja Seks Komersial yang mempertunjukan tubuhnya di pinggir jalan, peneliti juga menelusuri sepanjang jalan kereta yang ada di merak, Setelah ditelusuri sepanjang jalan rel kereta api Statomet merupakan tempat bernaungnya para Pekerja Seks Komersial, yang mana mereka menjajakan

³² Wawancara dengan Bapak Asep (P) selaku Kasie Rehabilitasi Sosial, 25september 2012, di kantor Dinas Sosial pada pukul 14.00.

tubuhnya di sepanjang rel kereta api dengan berbaring di atas tikar yang digelar. Ada lebih dari 50 PSK yang berada disitu, baik dari yang tua sampai yang muda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Daryanto, beliau masyarakat di Simpang, mengatakan bahwa ”

”dari segi agama kan itu melanggar syariat Islam, kalo dari sosialnya mengganggu perekonomian rumah tangga dan mengganggu keharmonisan rumah tangga pokoknya banyaklah segi negatifnya dari PSK. Mungkin mereka ga mau kaya gitu, mungkin karena faktor ekonomi mereka mencari penghasilan lain ga ada, alternatif lain ya mereka seperti itu.”³³

Seperti halnya tempat prostitusi, daerah Simpang merupakan salah satu tempat PSK menjajakan tubuhnya disitu dan kebanyakan daerah Simpang merupakan tempat berkumpul atau tempat singgah para PSK. Banyaknya PSK yang tinggal atau ngontrak di daerah simpang menyebabkan masyarakat risih dan terganggu dengan kehadiran PSK tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Mamak, beliau selaku mantan Lurah, mengungkapkan bahwa :

” tapi kalo dilihat pandangan mata tuh ga bagus apalagi suka nongkrong di pinggir – pinggir masjid itu, cewe satu cowoknya banyak.”³⁴

Tidak menutup kemungkinan bahwa kenyataannya memang benar keberadaan Wanita Tuna Susila ini sangat mengganggu pandangan dan meresahkan masyarakat. Dengan tingkah laku yang tidak wajar yang

³³ Wawancara dengan Bapak Daryanto (I³), seorang Masyarakat Simpang, 27 september 2012, pada pukul 19.30.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mamak (I⁴) seorang mantan Lurah Simpang dan Ketua DKM Simpang, 27 september 2012, pada pukul 20.00.

diperlihatkan kepada masyarakat. Sehingga membuat daerah Simpang menjadi tempat yang buruk. Padahal dari sebagian masyarakatnya merupakan masyarakat yang agamis. PSK yang tinggal di daerah ini kebanyakan yang bukan asli orang Cilegon, namun banyak yang berasal dari luar daerah. Mereka selalu mangkal dari jam 21.00 malam sampai dengan 03.00 subuh. Biasanya mereka mangkal di sekitar warung – warung sepanjang jalan Simpang. Menurut pendapat Hasuri selaku Ketua PK KNPI Jombang mengungkapkan bahwa :

*" kalo menurut kacamata saya, PSK itu emang di Cilegon itu banyak terutama di Merak. Seharusnya pemerintah itu tegas, terutama membina.ada pembinaan dari Dinsos tapi belum maksimal ga sepenuhnya, ga semuanya. Emang udah melakukan pembinaan, cuma masih terbatas, hanya 10 orang. Udah dibina trus dikirim ke Jakarta. Tapi masih ada bermunculan apalagi banyak tempat hiburan di Cilegon."*³⁵

Jelas sekali di lihat bahwa penanganan PSK belum dilakukan dengan maksimal. Masyarakat setempat yang tidak mau membuka mulut tentang keberadaan PSK tersebut membuat peneliti semakin sulit mendapatkan informasi, hal ini disebutkan oleh Mbak X, yang sudah 15 tahun punya warung disekitar rel kereta, mengungkapkan bahwa :

*" namanya orang kan ga sama, namanya orang sini kan takut ngeganggu, takut di sangkanya apa gitu, saya mah ga mau tau ga ikut campur."*³⁶

³⁵ Wawancara dengan Hasuri (I⁷) selaku Ketua PK KNPI Jombang, 14 Desember 2012, pada Pukul 16.00.

³⁶ Wawancara dengan Mbak X (I¹⁵) seorang pemilik warung di daerah Merak, 23 september 2012, pada pukul 23.00.

Hal di atas mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak mau ikut campur bahkan tidak mau mengiskus kehidupan PSK. Lain hal yang di ungkapkan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua RT Simpang, bahwa :

” saya juga ga enak untuk menyebutkan PSK di lingkungan saya, emang disini banyak, yg namanya PSK kan tinggal dimana mana. PSK kan penyakit masyarakat.”³⁷

Dari paparan di atas jelas sekali bahwa Ketua RT nya pun mengrahasiakan keberadaan Pekerja Seks Komersial di daerahnya.

Selama ini Dinas Sosial hanya membina PSK yang terjaring oleh Satpol PP dan PSK yang direkomendasikan oleh para germo atau mami untuk dibina. Dikarenakan banyaknya oknum – oknum yang menutupi dan menjaga PSK tersebut.

b. PSK dan Mantan PSK

PSK yang telah dibina ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan dapat berubah dari profesi semula. Sehingga tujuan Dinas Sosial pun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan program yang ada. Menurut pendapat mantan PSK, Mbak Borju mengatakan bahwa :

” dulu saya menikah dengan seorang lelaki, saya dulunya istri muda suami saya, tapi semenjak saya cerai dengan suami saya, saya terpaksa menjadi PSK, karena ga mampu orang ga punya. Jadi saya bekerja menjadi wanita malam selama 5 tahun, saya waktu itu di razia oleh Satpol PP trus dikirim ke Pasar Rebo. tapi setelah dapat pembinaan dari Pasar rebo dan saya sudah menikah lagi saya berhenti menjadi wanita malam dan saya membuka

³⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmat (I^h), seorang Ketua RT di daerah Simpang, 27 september 2012, pada pukul 21.00.

*usaha kecil – kecilan dirumah dan setiap harinya ngasih makan orang posko.*³⁸

Selanjutnya alasan yang diungkapkan oleh mantan PSK, Mbak A yang mengungkapkan bahwa :

*" saya dulu menjadi PSK gara – gara ikut suami ke Cilegon, trus cerai, punya anak 4 dan saya harus menafkahi anak saya. Udah gitu anak saya juga kuliah di LP3i. Saya udah tua dan saya tidak mau kaya begini terus, saya membuka usaha salon berdua dengan kakak saya. Walaupun sedikit untungnya tapi saya selalu memikirkan anak saya kedepannya.*³⁹

Dari ungkapan di atas dijelaskan bahwa seorang mantan PSK yang sudah berubah dan beralih profesi ke jalan yang benar. Walaupun usaha yang ditekuninya hanya usaha kecil – kecilan. Namun mereka tetap berusaha untuk menjalankan hidupnya dengan hasil usahanya. Usaha salon yang dilakukan oleh mbak "A" merupakan kerjasama dengan kakaknya, dimana dari hasil salon tersebut dibagi dua dengan kakaknya. Hal ini merupakan gambaran bagus yang diberikan oleh mantan PSK untuk para PSK yang masih berkeliaran diluar sana.

Dari pernyataan di atas di ketahui bahwa tidak terlihatnya peranan Dinas Sosial dalam menangani PSK. Justru dari pernyataan Mbak Borju Satpol PP lah yang berperan mengirim mereka ke Panti Rehabilitas di Pasar Rebo.

³⁸ Wawancara dengan Mbak Borju (I¹⁸), Mantan PSK, 26 September 2012, pada pukul 15.00

³⁹ Wawancara dengan Mbak A (I¹⁷), Mantan PSK, 28 September 2012, pada pukul 20.00

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari pemaparan di atas mengenai gambaran umum Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Menangani Pekerja Seks Komersial dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dalam menangani Pekerja Seks Komersial yang berada di tempat hiburan dan menjajakan dirinya di sekitar pinggiran jalan Kota Cilegon hanya melakukan pembinaan saja itu pun dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali, dikarenakan anggaran yang sangat minim untuk melakukan setiap program – program yang diadakan oleh Dinas Sosial. Karena bukan hanya ada satu permasalahan saja yang akan di tangani oleh Dinas Sosial, melainkan ada 22 PMKS yang akan ditangani oleh Dinas Sosial. Dari 22 PMKS dibagi menjadi 3 (tiga) bagian penanganan, yakni: Bagian Lembaga, Bagian Jaminan dan Bagian Rehabilitasi. Bagian Rehabilitasi menangani 6 (enam) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti : cacat, Wanita Pekerja Seks, Anak Jalanan, Lansia, Pengemis dan Pemakaman. Dinas Sosial melakukan pendekatan terhadap PSK yang tertangkap oleh Satpol PP. Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan dalam menangani PSK. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani Pekerja Seks Komersial Dinas Sosial melakukan Pembinaan di Dinas Sosial itu sendiri. Dikarenakan belum adanya tempat rehabilitasi di Kota Cilegon, sehingga terkadang Dinas Sosial melakukan Pelatihan terhadap PSK di tempat instruktur atau salon yang ditunjuk oleh Dinas Sosial. Kecuali tatapoga dilakukan di Dinas Sosial itu sendiri.

Namun yang dapat di ketahui, bahwa masih banyaknya masyarakat yang menutup – nutupi keberadaan PSK tersebut, sehingga Dinas Sosial pun sulit untuk mencari data dan mengetahui keberadaan PSK. Fakta lainnya diketahui bahwa setelah habis pembinaan dari Pasar Rebo PSK tidak dibekali oleh alat – alat Usaha, melainkan hanya alat – alat Rumah Tangga Seperti : Piring, Kompor dan Gelas saja.

Dalam konsep Kinerja Organisasi menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2008 : 77) mengemukakan ukuran Kinerja Organisasi, diantaranya :

- a. Tujuan, berkaitan dengan tujuan Dinas Sosial dalam menangani PSK
- b. Standar, berkaitan dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dinas Sosial.
- c. Alat / Sarana, menyangkut alat/sarana yang dipakai Dinas Sosial untuk menangani PSK.
- d. Kompetensi, menyangkut Apakah Dinas Sosial memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Motif, menyangkut bagaimana cara Dinas Sosial dalam memberikan motivasi bagi PSK.
- f. Peluang, menyangkut Kesempatan yang diberikan Dinas Sosial kepada PSK.
- g. Umpan balik, menyangkut kelayakan hidup yang dirasakan PSK dari Dinas Sosial.

Dari konsep di atas tentang Kinerja Organisasi, dapat dilihat Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial dikaitkan dengan Indikator tersebut.

1. Dalam segi Tujuan, Dinas Sosial mempunyai salah satu tujuan khususnya dalam Menangani Pekerja Seks Komersial yang ada di Kota Cilegon yakni untuk meminimalisir Pekerja Seks Komersial dan untuk

- merubah Pola pikir dan Gaya hidup Pekerja Seks Komersial menjadi jauh lebih baik lagi. Namun, Tujuan Dinas Sosial belum tercapai. Dikarenakan semakin banyak PSK yang belum mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pun tidak tepat pada sasaran, dimana yang mengikuti pembinaan bukan saja berasal dari kalangan PSK, melainkan berasal dari berbagai kalangan, yakni : Ibu Rumah Tangga, Pembantu Rumah Tangga, Anak Sekolah, Ibu Hamil dan Anaknya. Selanjutnya, pembinaan yang dilakukan hanya di daerah Merak yang mana sebagian dari penduduknya notabene adalah perantau yang berasal dari berbagai daerah, seperti : Lampung, Jawa, Sunda, dan lain – lain. Dinas Sosial juga tidak melakukan Pengawasan dan Bimbingan lanjut terhadap peserta yang mengikuti Pembinaan, sehingga kemampuan yang mereka miliki hanya dipakai pada saat itu saja, selanjutnya mereka kembali pada profesinya masing – masing.
2. Dalam Standar, Dinas Sosial menggunakan sistem pendekatan terhadap PSK, pendekatan yang dilakukan *face to face* dan mendengarkan keluhan para PSK. Dinas Sosial mempunyai program – program tertentu dalam pembinaan PSK, yakni : Pembinaan dan Pelatihan keahlian dalam bidang Salon dan Tataboga. Dalam melaksanakan programnya Dinas Sosial mempunyai Tahapan tertentu untuk menjalankannya, yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan. Dinas Sosial selalu bekerjasama dengan Satpol

- PP dan Dinas Kesehatan dalam menangani Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon. PSK yang tertangkap oleh Satpol PP diserahkan kepada Dinas Sosial dan kemudian Dinas Sosial meyerahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diperiksa urine. Jika ditemukan penyakit HIV/AIDS pada PSK, maka PSK tersebut akan dibina oleh Dinas Kesehatan. PSK yang terkena penyakit HIV/AIDS terus meningkat dari tahun ke tahun. Dinas Soaial juga bekerjasama dengan Germo/Mami dalam hal mengumpulkan peserta pembinaan sebanyak 25 orang. Jangka waktu Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah 10 hari, tapi kenyataannya pembinaan dilaksanakan dalam 5 hari saja. Kemudian Dinas Sosial memberikan Kompensasi kepada Germo/Mami yang sudah mengumpulkan peserta pembinaan dan Dinas Sosial juga memberikan uang transport kepada peserta pembinaan.
3. Untuk Alat/Sarana, Dinas Sosial sudah menyediakan sarana untuk menangani Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertempat di salon Merak. Setelah dilakukannya pembinaan Dinas sosial memberikan peralatan untuk para PSK yang telah dilatih dan dibina sesuai dengan kemampuannya masing – masing, seperti salon : maka akan diberikan seperangkat peralatan salon gunting, Hairdrayer, catokan, dan lain - lain, sedangkan tataboga akan diberikan seperangkat peralatan tataboga, cetak kue, kompor dan bahan – bahan untuk membuat kue.

4. Membahas tentang Kompetensi, Dinas Sosial tidak memiliki keahlian yang khusus dalam bidang tersebut. Kebanyakan Pegawai Dinas Sosial lulusan dari Ekonomi, Manajemen, Hukum, Komputer. Dalam melaksanakan tugas menangani PSK Kota Cilegon, Dinas Sosial selalu bekerjasama dengan para Instruktur Salon dan Tataboga. Dinas Sosial tidak mempermasalahkan latar belakang pendidikan yang di miliki oleh masing – masing pegawai. Asalkan pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil mencapai target.
5. Selanjutnya Motif, Dinas Sosial mempunyai motif tersendiri dalam menangani PSK Kota Cilegon, yaitu untuk meminimalisir PSK di Kota Cilegon dan supaya target sasaran Dinas Sosial Kota Cilegon dapat tercapai 25 orang per tahunnya. Selain itu juga Motif untuk para Pekerja Seks Komersial adalah karena keadaan ekonomi yang menuntut mereka untuk bekerja seperti itu. Masih banyaknya para pembeli dan oknum – oknum yang menyediakan jasa remang – remang juga merupakan motif para Germo untuk mengambil keuntungan.
6. Untuk Peluang, Dinas Sosial memberikan peluang bagi PSK yang dibina untuk dapat membuka usaha sendiri dengan diberikannya alat – alat usaha. Sedangkan peluang yang didapat oleh Dinas Sosial adalah Pendekatan terhadap Pekerja Seks Komersial dan mengetahui segala permasalahan yang ada didalam diri PSK tersebut. Sehingga Dinas Sosial dapat mencari memberikan arahan dan pembinaan kepada PSK tersebut.

7. Dalam hal Umpan Balik, Permasalahan Pekerja Seks Komersial di Kota Cilegon semakin meresahkan Masyarakat setempat. Daerah yang ditinggali oleh PSK tersebut menjadi buruk dimata masyarakat. Dikarenakan tingkah dan sikap yang ditunjukkan oleh PSK tersebut sangatlah negatif. Mantan PSK yang kini telah membuka usaha sendiri menjadi pandangan yang baik untuk PSK lainnya. Kesadaran dan umur yang sudah semakin tua merupakan patokan untuk perubahan dari dalam diri sendiri.

Peneliti mengadakan penelitian terhadap Pekerja Seks Komersial di berbagai tempat hiburan dan di sepanjang pinggiran jalan Kota Cilegon. PSK yang berada di Regent memiliki kuota \pm 50 orang, Dynasty \pm 40 orang, Merak \pm 50orang dan di sepanjang jalan simpang tidak teridentifikasi oleh peneliti. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada PSK dilakukan di Merak, sedangkan PSK di Regent, Dynasty dan Simpang hanya mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan. Selama penelitian, peneliti menemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam menangani Pekerja Seks Komersial, diantaranya : Tidak Tepat Sasaran, Tidak Sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pembinaan dilakukan hanya di Daerah Merak saja, tidak adanya pengawasan terhadap PSK yang sudah dibina, tidak adanya Bimbingan lanjut untuk PSK. Dari permasalahan di atas, peneliti membuat diagram sebagai berikut :

Dari semua penjelasan di atas peneliti dapat membuat tabel yang dapat menggambarkan semua temuan peneliti dalam penelitian terhadap Dinas Sosial Kota Cilegon dan Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon, sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian didapat hal sebagai berikut :

1. Tujuan, dari Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam menangani Pekerja Seks Komersial belum maksimal dan belum tercapai. Dikarenakan masih banyaknya PSK yang berkeliaran di Kota Cilegon. Sasaran untuk pembinaan dalam menangani PSK tidak tepat. Bimbingan Lanjut yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial sesudah pembinaan tidak dilakukan. Dalam mencapai target pembinaan Dinas Sosial bekerjasama dengan Mami / Germo setempat.
2. Standar, Dalam penanganan Pekerja Seks Komersial Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Kenyataannya Dinas Kesehatan lebih dikenal oleh para PSK, sedangkan Dinas Sosial tidak dikenal karena jarang melakukan sosialisasi terhadap PSK. Waktu pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kurang dari 10 hari, melainkan hanya dilakukan 5 hari saja.
3. Alat / Sarana, Sarana yang diberikan Dinas Sosial untuk pembinaan PSK hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Alat yang diberikan Dinas Sosial setelah melakukan pembinaan terhadap PSK, seperti : Hairdrayer, Gunting, Sisir dan lain – lain tidak digunakan oleh peserta pembinaan.

4. Kompetensi, Dinas Sosial tidak pernah mempermasalahkan latar belakang pendidikan.
5. Motif, Dinas Sosial melakukan pembinaan hanya untuk menjalankan program tanpa melihat target atau sasaran. Selain itu motif dari PSK adalah karena keadaan ekonomi dan tuntutan hidup.
6. Peluang, Dalam pencapaian target Dinas Sosial melakukan pembinaan selama setahun sekali dengan kapasitas 25 orang tiap tahunnya, hingga mencapai 100% pada masa kerja 5 tahun, Dinas Sosial dapat naik jabatan. Sedangkan peluang untuk PSK tidak ada sama sekali peluang yang dirasakan. Dikarenakan pembinaan tidak dirasakan oleh PSK itu sendiri, melainkan dirasakan oleh orang – orang yang mengikuti pembinaan yang berasal dari berbagai kalangan.
7. Umpan balik, setelah melakukan pembinaan tidak ada umpan balik yang diberikan PSK. Mereka masih tetap pada profesinya. Masyarakat yang tidak ingin ikut campur dan peduli dengan PSK di lingkungannya. Mantan PSK yang dapat memberikan contoh bagi PSK.

5.2 Saran

Permasalahan – permasalahan yang terjadi terkait dengan Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks Komersial tidak sepenuhnya dapat dilimpahkan kepada instansi bersangkutan, saran dari peneliti terkait permasalahan tersebut, diantaranya :

1. Harus membangun kerjasama yang baik antara Masyarakat, Satpol PP dan Dinas Sosial, dengan cara saling melaporkan bila ada tindakan prostitusi, dengan begitu kerjasama yang saling menguntungkan akan terjalin dalam menangani PSK.
2. Dibangun Tempat Rehabilitasi PSK di Kota Cilegon agar Dinas Sosial dapat melakukan pembinaan terhadap Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon dan agar PSK terlepas dari pekerjaan lamanya.
3. Dinas Sosial juga harus dapat membenahi diri lagi untuk kedepannya, baik dari segi data yang ada, pelaksanaan tugasnya, agar timbul perbaikan dari waktu – ke waktu, misalnya perekap data PSK dan penentuan program – program pembinaan.
4. Peran Masyarakat pun sangat penting dalam memberantas penyakit masyarakat, untuk itu masyarakat harus dapat melakukan pelaporan atau pengaduan ke pihak yang berwajib jika menemukan hal – hal mengenai praktek prostitusi. Keamanan dan Ketertiban yang didambakan masyarakat akan terwujud jika masyarakat dapat berperan serta dalam dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut.
5. Respon dari Instansi Pemerintah dalam menyikapi adanya pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan PSK di Kota Cilegon harus lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hady & Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya : Bandung.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Herdiyanto, C Arief. 2001. *Modul Penyimpangan Sosial Kelas II*.
- Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu – ilmu Sosial. Depok.
- James A Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 305
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit : UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: FE UGM
- Mangkunegara, Prabu Anwar. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Penerbit : PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Muhamad, Arni. 2008. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Penerbit : Bayumedia Publishing. Malang.
- Rucky, Ahmad S. 2001. Sistem Manajemen Kinerja. PT. Gramedia, Jakarta
- Sedarmayanti. 1995. *Sumber Daya Manusia dan produktivitas Kinerja*. Ilham Jaya. Bandung
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Ilham Jaya. Bandung
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali : Jakarta

- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- _____. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung.
- _____. "Kebijakan Sosial" makalah yang disampaikan pada *Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli, Jenjang Madya, BBPPKS*, Lembang 14 November 2006.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit : Alfabeta. Bandung.
- Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Pratik*. PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori Aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yaunita, Sari. 2011. *Fenomena dan Tantangan Remaja Menjelang Dewasa*. Yogyakarta : Brilliant Books.

Referensi lainnya :

- <http://diegasite.blogspot.com/2010/01/penyakit-sosial.html>, diakses pada tanggal 02 November 2011, pada pukul 19.00.
- http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_17.html, diakses pada tanggal 02 November 2011, pada pukul 19.30.
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-kebijakan-sosial.html>, diakses pada tanggal 03 November 2011, pada pukul 12.00.
- <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=27&submit.y=19&page=1&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Fjdkv%2F2007%2Fjiunkpe-ns-s1-2007-42403022-9875-dolly-chapter2.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2012, pada pukul 13.00.

Pedoman Wawancara

No.	Indikator Kinerja Organisasi	Daftar pertanyaan	Ditujukan untuk		
			Dinas Sosial	PSK	Masyarakat
1.	Tujuan	1. Apakah tujuan Dinas sosial sudah tercapai dalam menangani PSK di kota cilegon ?	√		
2.	Standar	1. Apakah prosedur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanganan PSK Dinas Sosial sudah dilakukan? 1. Bagaimana Dinas Sosial melakukan komunikasi, pengawasan dan penertiban PSK?	√ √		

		2. Apakah program – program kerja Dinas Sosial dalam menangani PSK sudah terkoordinasi dan terintegrasi?	√		
3.	Alat / Sarana	2. Bagaimana cara Dinas Sosial dalam menangani PSK? 3. Bagaimana Dinas Sosial menangani PSK yang terkena penyakit HIV / AIDS? 4. Sarana apa saja yang dapat di rasakan oleh PSK? 5. Peralatan apa saja yang di dapat PSK setelah dilakukannya pembinaan oleh	√ √	√ √	

		Dinas Sosial ?			
4.	Kompetensi	Apakah Dinas Sosial memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya menangani PSK?	√		
5.	Motif	1. Apakah motif Dinas Sosial ikut serta dalam menangani PSK? 2. Motif apa saja yang membuat PSK terjun ke dunia Malam?	√	√	
6.	Peluang	1. Peluang apa saja yang akan didapat oleh Dinas Sosial ? 2. Peluang apa saja yang dapat dirasakan PSK?	√	√	
7.	Umpan Balik	Bagaimana tanggapan mengenai kinerja Dinas Sosial kota cilegon dalam menangani PSK ?		√	√

TABEL 4.3 TEMUAN HASIL PENELITIAN

No.	Judul Penelitian	Aspek – Aspek	Temuan Penelitian	Sebelum	Keterangan
1.	KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL	TUJUAN	a. Dilakukannya Pembinaan Salon di Merak dan di Cilegon	Hanya melakukan Manajerial pendataan PSK	masih banyak PSK yang berkeliaran di Kota Cilegon yang butuh pembinaan dari Dinas Sosial
b. Sasaran Pembinaan tidak tepat			Hanya PSK yang tertangkap yang di bina dan di data.	Ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, anak sekolah, ibu hamil yang mengikuti pembinaan salon di Merak dan ibu – ibu kader Posyandu yang mengikuti pembinaan Tataboga. sekedar informasi dan	
c. Bimbingan Lanjut tidak dilaksanakan			Tidak ada bimbingan lanjut adanya hanya sosialisasi terhadap PSK yang tertangkap	bertanya saja kepada Germo/mami tentang perkembangan peserta pembinaan	
d. Bekerjasama dengan Germo/Mami dan Orang – orang yang punya Link dengan			Pendekatan terhadap PSK yang tertangkap	Mami “R” untuk daerah Merak dan Mbak Aning untuk daerah Terate Udik	

			Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan PSK.		
2.		STANDAR	a. Untuk Penanganan PSK Dinsos bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan	Hanya dengan SATPOL PP	
			b. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP, Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial	Penertiban dan pembinaan dilakukan oleh SATPOL PP	
			c. Penangkapan PSK diberikan 2 kali kesempatan, dalam 3 kali penangkapan PSK akan dikirim ke tempat Rehabilitasi Pasar Rebo.	Didata dan dilepaskan	
			d. Dinas Kesehatan yang lebih dikenal oleh para PSK.	Satpol PP yang dikenal PSK	Dinas Kesehatan jauh lebih aktif dibandingkan dengan Dinas Sosial. Dinas Kesehatan selalu melakukan sosialisasi dengan PSK yang ada di

					<p>jalan maupun yang ada di Tempat Hiburan. Sedangkan Dinas Sosial hanya menunggu hasil razia dari Satpol PP</p> <p>Tidak ada Sosialisasi terhadap PSK Kota Cilegon.</p>
			e. Pembinaan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu : Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Pembinaan dilakukan hanya sosialisasi dan pendataan	Pembinaan salon di lapangan hanya 5 hari.
			f. Waktu pembinaan kurang dari 10 hari.	Waktu pembinaan 1 hari	
			g. Uang transport yang diberikan untuk PSK yang dibina Rp 50.000 per orang	Tidak diberikan uang transport	
3.	KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PEKERJA	ALAT / SARANA	a. Sarana yang diberikan Dinas Sosial untuk pembinaan PSK hanya	Diberikan pengarahan terhadap PSK	Tahun 2011 dilakukan pembinaan Salon, Tahun 2012 dilakukan

	SEKS KOMERSIAL		jangka waktu 1 tahun sekali		pembinaan Tataboga. Anggaran Minim
			b. Pembinaan dan Pelatihan Salon dilaksanakan di Salon” R” Daerah Merak. Sedangkan Tataboga dilakukan di Dinas Sosial.	Pembinaan dilakukan di Dinas Sosial	Peserta pembinaan 25 orang
			c. Alat yang diberikan seperangkat alat salon seperti gunting, sisir, hairdryerdan lain- lain Alat yang diberikan untuk pelatihan tataboga yaitu: kompor gasa, plangkat, mixer,oven dan lain- lain.	Tidak diberikan alat, melainkan hanya memberikan pengarahan	- Peralatan salon peserta pembinaan diberikan kepada salaon yang bersangkutan - Peralatan Tataboga peserta pembinaan dipakai sendiri untuk keperluan sehari – hari.
4.		KOMPETENSI	a. Hanya ada 1 pegawai saja yang memiliki kompetensi dalam bidang sosial.		Pegawai lainnya berasal dari jurusan Ekonomi, hukum, agama, manajemen dan computer.

			b. Dinsos tidak permasalahan Latar Belakang Pendidikan, yang penting TUPOKSI dilaksanakan dengan baik.		TUPOKSI tercapai
5.	KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL	MOTIF	a. Motif Dinas Sosial : melakukan pembinaan hanya untuk menjalankan program yang ada, tanpa melihat target atau sasaran.	Motifnya hanya mengirim PSK ke Tempat Rehabilitasi	Program Pembinaan Salon di Merak dan Program Pembinaan Tataboga.
b. Motif PSK : dikarenakan keadaan ekonomi. cerai dengan suami, susah cari kerja.				PSK Simpang, Regent dan Dynasti	
6.		PELUANG	a. Peluang Pegawai : dengan dilaksanakannya program-program pembinaan secara bertahap dan memenuhi kapasitas peserta sebanyak 25 per tahunnya, maka kinerja yang dilakukan Dinas Sosial dinyatakan baik		- Masih banyak PSK - Tidak ada PSK yang membuka usaha Salon.

			<p>dan kemungkinan akan memberikan peluang bagi pegawai untuk naik jabatan.</p> <p>b. Peluang PSK : Tidak ada peluang yang dirasakan</p>	Tidak ada peluang	Tidak ada peluang bagi PSK dikarenakan sarana, keterampilan, pengetahuan, pelatihan dan peralatan yang seharusnya di dapat tidak di dapat oleh PSK tersebut.
7.	<p>KINERJA DINAS SOSIAL KOTA CILEGON DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL</p>	<p>UMPAN BALIK</p>	<p>a. Umpan balik PSK : menginginkan Pembinaan lagi dan mendapat perhatian lebih.</p>	Tidak ada umpan balik PSK	Pembinaan Salon dan Tataboga
<p>b. Umpan Balik Mantan PSK : lebih diperhatikan lagi oleh Dinas Sosial</p>			Tidak ada umpan balik dari Mantan PSK		
<p>c. Umpan Balik Masyarakat : Tidak mau ikut</p>				- Tidak adanya sosialisasi Dinas Sosial kepada	

			berpartisipasi dalam menangani PSK, dikarenakan PSK tinggal di lingkungannya.		masyarakat Simpang - Merahasiakan keberadaan PSK
--	--	--	---	--	---

GAMBAR 4.7 DIAGRAM PEMBINAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL

